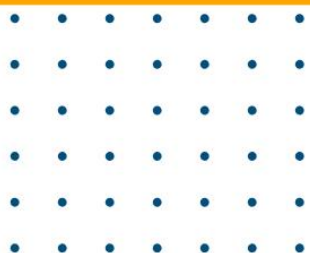


LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan atas pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan selama tahun 2024 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait. Melalui laporan kinerja diharapkan capaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024 dapat diukur serta dipahami serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Saran dan masukan kami harapkan dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk penyusunan laporan berikutnya. Besar harapan kami Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dapat memberikan manfaat terutama dapat menjadi *feedback* bagi proses perencanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur

Dr. Rachmat, S.Si., M.Si.
NIP 198011272005011001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menggambarkan capaian kinerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2024. Sasaran kegiatan tersebut berupa meningkatnya penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap luas serangan OPT dan DPI, serta meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut disusun indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024 yang meliputi: rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan minimal 99,5%; rasio luas areal terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan total areal terkena DPI minimal 70%; jumlah sertifikat hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan minimal 2.200 lhp/sertifikat; tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan minimal 3,28 skala likert dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT minimal 3,40 skala likert.

Pelaksanaan berbagai kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dilakukan untuk mencapai sasaran strategis, diantaranya: Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Padi Pilot Project, Gerakan Pengendalian OPT, Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim, Pembuatan Sumur, Pengujian Mutu Produk Tanaman dan Pengadaan Bantuan Pestisida. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp144.174.949.000,-

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, secara keseluruhan capaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan masuk ke dalam kategori sangat berhasil (>100%), dengan rincian sebagai berikut: rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT dan rasio terkena DPI yang ditangani terhadap luas terkena berturut-turut sebesar 99,48% dan 109,85%; jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebanyak



2.801 LHP/sertifikat dari target 2.200 LHP/sertifikat atau tercapai sebesar 127,32%; tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait dengan layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar 103,81%; dan IKM atas layanan publik BPMPT sebesar 103,91%.

Realisasi beberapa kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan antara lain Gerakan Pengendalian OPT Serealia sebesar 100%, Gerakan Pengendalian OPT Akabi sebesar 100%, Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim sebesar 100%, Pembuatan Sumur sebesar 100%, dan Pengujian Mutu Produk Tanaman sebesar 127,32%, dan Akreditasi ISO/IEC 17025 sebesar 100%. Secara keseluruhan, realisasi anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar Rp142.844.317.863 (99,08%) dari total anggaran Rp144.174.949.000,-.

Kendala utama pelaksanaan kegiatan antara lain perubahan iklim ekstrim dan *elnino* yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan dan berubahnya waktu tanam, kurangnya jumlah personil petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) di lapangan sehingga belum dapat menjangkau semua wilayah pengamatan, kurangnya sarana dan prasarana kerja bagi petugas POPT, minimnya kegiatan peningkatan kompetensi petugas lapangan serta sebagian petani belum menggunakan varietas tahan OPT/DPI dan menerapkan pengendalian OPT secara ramah lingkungan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain penetapan calon petani calon lokasi (CPCL) sesuai kriteria yang ditetapkan pada awal tahun, mempercepat penyusunan petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan melakukan sosialisasi secara intensif, melakukan pengawalan dan pembinaan petugas dan petani untuk percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan dengan stakeholder atau lembaga terkait, serta percepatan realokasi kegiatan dari daerah yang terkendala pelaksanaannya ke daerah yang membutuhkan dan potensial.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4 Sumber Daya Manusia	6
1.5 Dukungan Anggaran	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024	8
2.2. Perencanaan Kinerja	12
2.3. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
2.4. Pengukuran Indikator Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja	18
3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2024	34
3.3. Realisasi Kegiatan	35
3.4. Realisasi Anggaran	49
3.5. Permasalahan dan Upaya Tindaklanjuti	53
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	60



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024	6
2. Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024	14
3. Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024	15
4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024	18
5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun	20
6. Kontribusi Penyelamatan Produksi Tanaman Pangan Akibat OPT/DPI	21
7. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024 per Komoditas	22
8. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Padi Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	23
9. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Jagung Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	24
10. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kedelai Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	25
11. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	26
12. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Hijau Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	28



13. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Kayu Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	29
14. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Jalar Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)	30
15. Perbandingan Jumlah Sertifikasi Hasil Uji Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pupuk dan Pestisida BPMPT Tahun 2020 – 2024	31
16. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPMPT Tahun 2020 – 2024	32
17. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah	33
18. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024	34
19. Realisasi Kegiatan Utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024	35
20. Realisasi Kegiatan PPHT Padi	36
21. Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT	38
22. Realisasi Kegiatan Gerakan Penanganan DPI	40
23. Realisasi Kegiatan Bantuan Sumur	43
24. Kegiatan Akreditasi ISO/IEC 17025	47
25. Realisasi Kegiatan yang mendapatkan <i>dynamic tagging</i>	49
26. Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	50
27. Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	51
28. Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024	61
2. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Padi Oktober 2023 – September 2024	63
3. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Jagung Oktober 2023 – September 2024	64
4. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kedelai Oktober 2023 – September 2024	65
5. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Tanah Oktober 2023 – September 2024	66
6. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Kacang Hijau Oktober 2023 – September 2024	67
7. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Ubi Kayu Oktober 2023 – September 2024	68
8. Luas Serangan OPT Utama pada Tanaman Ubi Jalar Oktober 2023 – September 2024	69
9. Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Padi Oktober 2023 – September 2024	70
10. Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Jagung Oktober 2023 – September 2024	71
11. Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Kedelai Oktober 2023 – September 2024	72
12. Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Kacang Tanah Oktober 2023 – September 2024	73
13. Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Kacang Hijau Oktober 2023 – September 2024	74
14. Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Ubi Kayu Oktober 2023 – September 2024	75



15. Luas Banjir dan Kekeringan pada Tanaman Ubi Jalar Oktober 2023 – September 2024	76
16. Realisasi PPHT Padi Tahun 2024	77
17. Gerakan Pengendalian OPT Akabi Tahun 2024	78
18. Gerakan Pengendalian OPT Serealia Tahun 2024	79
19. Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tahun 2024	80
20. Kegiatan Pembuatan Sumur Tahun 2024	81
21. Hasil Survei Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024	82
22. Analisis Skala Likert Hasil Survei Tingkat Kepuasan Layanan Internal	86
23. Perjanjian Kerja Kepala BPMPT Tahun 2024	87
24. Hasil Perhitungan Sembilan Nilai Unsur Pelayanan dalam Kuesioner SKM BPMPT Tahun 2024	88
25. Hasil Reviu Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024	90



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam jenis komoditas unggulan, seperti padi, jagung, hingga hasil perkebunan. Sektor ini tidak hanya menjadi penopang ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor.

Di sisi lain, sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi sekitar 27,33% tenaga kerja Indonesia (data BPS, 2024). Peran ini menjadikannya penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan. Namun demikian, sektor pertanian juga menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi produktivitas, keberlanjutan dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian. Beberapa tantangan utama dalam sektor pertanian meliputi: perubahan iklim ekstrem; keterbatasan sumber daya alam seperti ketersediaan air terbatas, degradasi tanah, dan kekurangan sumberdaya lainnya yang dapat membatasi potensi pertanian; fluktuasi pasar; keterbatasan akses teknologi; peningkatan resistensi hama dan penyakit; urbanisasi dan perubahan gaya hidup; kurangnya kapasitas dan pendidikan petani; kesejahteraan petani; serta isu lahan dan alih guna lahan. Penyelesaian tantangan tersebut memerlukan adanya pendekatan terpadu yang melibatkan kerja sama berbagai pihak diantaranya pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan petani sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian turut serta berperan aktif dalam upaya penyelesaian tantangan kompleks di sektor pertanian yang dapat menghambat penurunan produksi pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan tanaman pangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pelaksanaan kegiatan



perlindungan tanaman pangan serangan OPT dan terkena DPI dalam pelaksanaannya lebih mengedepankan tindakan *pre-emptif* atau bersifat pencegahan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu (PHT) yang mengutamakan penerapan budidaya tanaman sehat, pengamatan rutin, pemanfaatan musuh alami dan pemberdayaan petani sebagai ahli PHT. Apabila dalam pelaksanaannya diperkirakan akan terjadi peningkatan populasi yang tidak dapat diatasi dengan cara *pre-emptif*, maka dapat dilakukan tindakan responsif melalui aplikasi Agens Pengendali Hayati (APH), pestisida nabati atau pestisida kimia dengan tetap melaksanakan prinsip enam tepat (6T) yaitu: tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara dan tepat mutu. Selain itu, dalam rangka menjaga keamanan produk tanaman pangan dari senyawa kimia/kandungan logam/residu dan untuk menjamin efektivitas daya kerja pestisida maka dilakukan pengujian mutu produk tanaman oleh Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT).

Berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, pelindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem PHT serta penanganan DPI. Pelaksanaan pelindungan pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah menetapkan kebijakan Pelindungan pertanian pada komoditas tanaman pangan dilaksanakan dengan sistem PHT dan penanganan DPI yang mengedepankan cara pengendalian OPT dan penanganan DPI yang aman bagi lingkungan dan kesehatan serta spesifik lokasi (kearifan lokal). Adapun penggunaan bahan pengendali kimia sintesis merupakan cara terakhir untuk pengendalian OPT dan digunakan secara tepat berdasarkan hasil pengamatan OPT di lapangan.

1.2 Tugas dan Fungsi



Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- 1 Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan
- 2 Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
- 3 Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim
- 4 Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim
- 5 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim
- 6 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim
- 7 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serealia, aneka kacang dan umbi, serta penanggulangan dampak perubahan iklim
- 8 Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

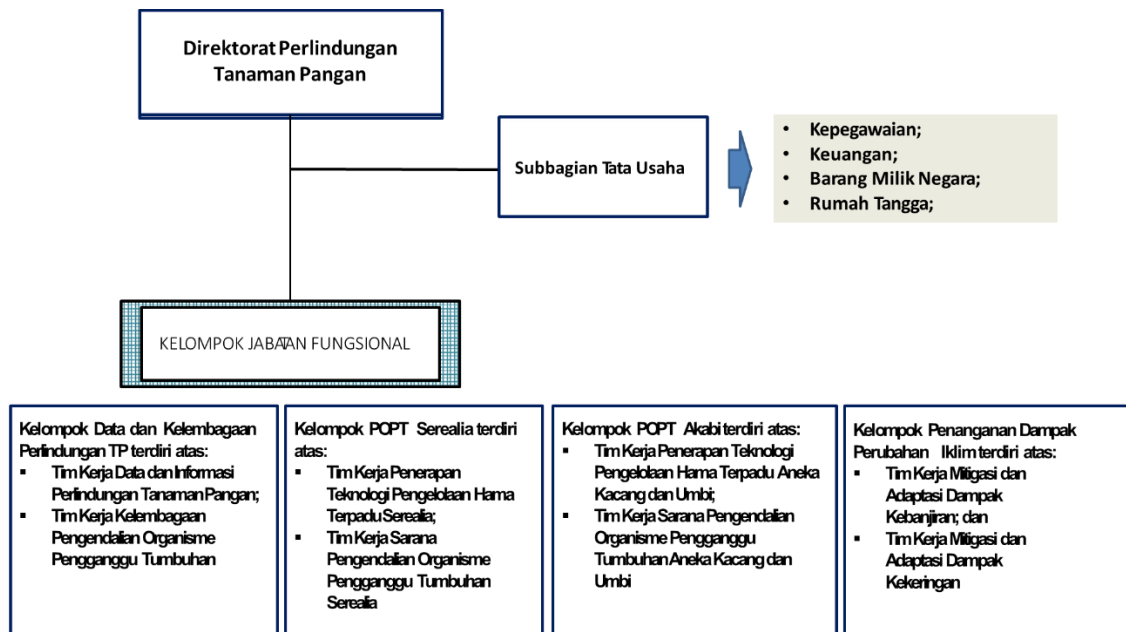
Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Data dan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan.
- b. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Serealia.
- c. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Aneka Kacang dan Umbi.
- d. Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam melaksanakan kegiatan perlindungan didukung oleh Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan



pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, dan kearsipan.



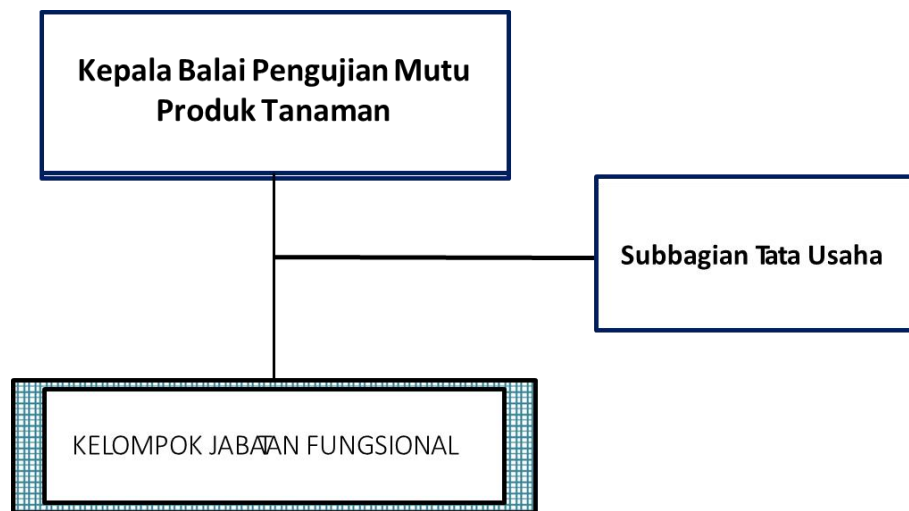
Selain itu, terdapat unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu BPMPT, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tugas utama BPMPT yaitu melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida. BPMPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- pengelolaan sampel produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta sampel pupuk dan pestisida;
- pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- pelaksanaan perumusan hasil pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pemeriksaan dan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida;
- pelaksanaan pemantauan mutu pestisida dan pupuk yang beredar, serta produk

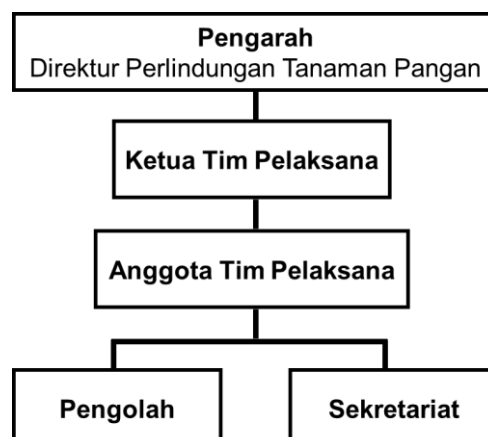


- tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai PMPT.

Susunan organisasi BPMPT terdiri atas : Kepala, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Selain itu, untuk menunjang keberhasilan kegiatan perlindungan tanaman pangan diperlukan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, dan handal dalam pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan tanaman pangan perlu dibentuk Tim Satuan Pelaksanan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Adapun susunan Tim dimaksud adalah sebagai berikut:



Tata hubungan kerja antara pemerintah dengan provinsi/kabupaten/kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan telah dilakukan pelimpahan kewenangan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan.

1.4 Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada tahun 2024 berjumlah 70 orang, terdiri dari Pegawai Negeri sebanyak 62 orang, PPPK sebanyak 2 orang, dan THL sebanyak 6 orang. Rincian keadaan pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024

No.	Unit	Golongan				PPPK	THL	JML
		IV	III	II	I			
1	Direktur	1	-	-	-		-	1
2	Subbagian Tata Usaha	-	10	2	-	2	6	20
3	Subdit. Kelembagaan Data dan POPT	3	12	-	-		-	15
4	Subdit. Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim	5	6	-	-		-	11
5	Subdit. Pengendalian OPT Serealia	4	9	1	-		-	14
6	Subdit. Pengendalian OPT Akabi	2	7	-	-		-	9
	Jumlah	15	44	3	0	2	6	70

1.5 Dukungan Anggaran

Pencapaian target sasaran dan pelaksanaan kegiatan membutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi pendanaan secara tepat sasaran serta penggunaan dana yang efektif dan efisien. Dukungan pendanaan berasal dari pemerintah pusat (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) dan dari sumber lain yaitu: (a) pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (b) swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (c) investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi asing (PMA); (d) lembaga



keuangan dan perbankan (skim kredit dan kredit komersial); dan (e) swadaya masyarakat. Sumber dana pembangunan pertanian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena besarnya nilai dana yang dibutuhkan.

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2024 di pusat didukung dengan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sedangkan di daerah didukung dengan anggaran yang tertuang dalam DIPA Dana Dekonsentrasi melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH). Satker Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (Pusat) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp96.302.269.000, dan alokasi Dana Dekonsentrasi Rp47.872.680.000.



II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mendukung pencapaian sasaran pada program yang diampu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu “Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas”. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mencanangkan visi **“Terwujudnya sistem pengamanan areal pertanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI (banjir dan kekeringan) melalui penerapan PHT dan adaptasi perubahan iklim”**. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kebijakan yang diambil terkait perlindungan tanaman pangan dalam pengendalian OPT dilaksanakan melalui sistem PHT, sedangkan penanganan DPI dilaksanakan melalui upaya adaptasi dan mitigasi dengan memadukan berbagai teknologi dan cara/metode yang dikembangkan dalam satu kesatuan strategi budidaya tanaman. Keseluruhan penerapan metode tersebut dilaksanakan dalam rangka Pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melakukan dukungan perwujudan pencapaian diatas dengan penetapan misi yaitu:

- a. Meningkatkan pengamatan dan sistem peringatan dini OPT dan DPI.
- b. Meningkatkan penerapan prinsip PHT dalam rangka pengendalian OPT dan penanganan DPI di pertanaman.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) perlindungan tanaman.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman.
- e. Meningkatkan penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan sesuai prinsip PHT.



f. Meningkatkan mutu dan daya saing produk tanaman pangan

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2020-2024 menetapkan 5 (lima) Program Utama sebagai strategi dalam upaya Pengamanan areal pertanaman tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI dalam rangka mendukung Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, yang terdiri dari:

- Penguatan penerapan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI
- Penguatan pengamatan OPT/DPI
- Penguatan sumber daya manusia
- Penguatan sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI
- Penguatan daya dan kelembagaan perlindungan tanaman pangan

Dalam pelaksanaannya, penerapan strategi penguatan perlindungan tanaman pangan tersebut kemudian ditindaklanjuti menjadi delapan kegiatan utama yaitu:

- a. Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) Padi
- b. Gerakan pengendalian OPT Serelia
- c. Gerakan pengendalian OPT Akabi
- d. Gerakan Penanganan DPI banjir dan kekeringan
- e. Pembuatan sumur
- f. Pengujian mutu produk
- g. Bantuan pestisida
- h. Akreditasi ISO/IEC 17025

Kegiatan yang telah ditetapkan merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran baik pusat maupun daerah serta dapat menyesuaikan kondisi yang terjadi kedepannya. Terlaksananya kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai sasaran yang diinginkan yaitu meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan sebagai upaya dalam rangka mendukung program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan nasional terjaganya ketersediaan pangan strategis nasional dan pengembangan kawasan tanaman pangan berbasis korporasi petani.



Sejalan dengan hal tersebut, maka Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengendalian OPT dilakukan dengan sistem PHT.
- b. Memprioritaskan teknologi ramah lingkungan melalui pendekatan pengelolaan agroekosistem dan spesifik lokasi
- c. Pestisida kimia sintesis merupakan cara terakhir untuk pengendalian OPT dan digunakan secara tepat dan bijaksana berdasarkan hasil pengamatan OPT.
- d. Sasaran pengamanan produksi: produksi tinggi, OPT/DPI terkendali, produk berkualitas, pendapatan petani meningkat, lingkungan lestari.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 48 menyatakan bahwa perlindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim. Pelaksanaan perlindungan pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, perlindungan tanaman tidak diperkenankan menggunakan sarana prasarana budidaya pertanian dan/atau cara yang berdampak pada kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau kelestarian lingkungan hidup serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman.

Kebijakan pengendalian OPT adalah pelaksanaan prinsip PHT dengan mengedepankan tindakan *pre-emptif*. Prinsip PHT meliputi penerapan budidaya tanaman sehat, pengamatan rutin, pemanfaatan musuh alami dan mendorong petani sebagai ahli PHT. Apabila dalam pelaksanaan pengamanan pertanaman terjadi peningkatan populasi yang tidak dapat diatasi dengan cara *pre-emptif* maka dilakukan secara responsif menggunakan bahan pengendali kimia. Upaya *pre-emptif* adalah upaya perencanaan agroekosistem dengan merekayasa lingkungan pertanaman agar terjadi keseimbangan sehingga perkembangan OPT terkelola tidak melebihi ambang pengendalian. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya *pre-emptif* diantaranya pergiliran tanaman/varietas, penggunaan varietas tahan, pemupukan berimbang, penanaman refugia, dan pemanfaatan musuh alami/APH. Pengendalian responsif adalah tindakan pengendalian OPT berdasarkan hasil pengamatan agroekosistem



secara periodik. Apabila ditemukan serangan/populasi OPT di bawah ambang pengendalian dilakukan pengendalian menggunakan APH/pestisida nabati, dan apabila di atas ambang pengendalian dapat digunakan pestisida kimia dengan menerapkan prinsip enam tepat (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis dan konsentrasi, tepat cara, tepat waktu, dan tepat mutu.

Pemanfaatan teknologi dalam pengamanan pertanaman dari gangguan OPT dan terkena DPI terus dikembangkan dan dimasyarakatkan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Teknologi pengendalian OPT saat ini telah berkembang secara dinamis, aplikatif dan muktahir diharapkan dapat membantu penanganan OPT dan DPI di lapangan. Pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid, predator dan patogen sebagai sarana pengendalian OPT, cukup efektif dalam menekan luas dan intensitas serangan OPT. Pemanfaatan beberapa APH berupa cendawan entomopatogen seperti *Beauveria bassiana*, *Metarrhizium anisopliae* dan parasitoid *Trichogramma* serta predator (ular, burung hantu, anjing pemburu dan lain-lainnya) layak untuk dikembangkan dan dimasyarakatkan secara luas.

Penanganan DPI (banjir/kekeringan) dilakukan melalui upaya adaptasi dan mitigasi dengan memanfaatkan sarana seperti pompa air, pembuatan sumur suntik dan penggunaan benih yang tahan terhadap genangan atau kekeringan merupakan salah satu contoh dalam upaya penanganan DPI tersebut. Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi terkini seperti penggunaan pesawat nirawak/drone juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengamatan dan pengendalian OPT di lapangan.

Petugas lapang (POPT/THL POPT) sebagai ujung tombak pengamanan pertanaman di lapangan harus secara berkesinambungan diberikan informasi/pemahaman/pelatihan/sosialisasi tentang perkembangan teknologi dimaksud. Melalui bekal pengetahuan tersebut diharapkan petugas lapang mampu/cakap dalam pengaplikasiannya serta menjadi pendamping yang baik bagi petani/masyarakat di wilayah kerjanya.

Perlindungan tanaman pangan dilaksanakan untuk mewujudkan tercapainya kuantitas, kualitas dan kontinuitas hasil sesuai dengan sasaran produksi tanaman pangan. Pelaksanaannya dengan mendorong kemandirian petani dalam penanganan OPT dan DPI, sedangkan pemerintah berperan dalam memberikan informasi,



teknologi dan bantuan sarana pengendalian dalam keadaan eksplosi. Mengacu kepada visi, strategi dan kebijakan perlindungan tanaman pangan, program perlindungan tanaman pangan mencakup lima subsistem perlindungan sebagai fokus kegiatan yaitu: a) Pengamatan dan deteksi dini serangan OPT/DPI, b) Penerapan teknologi pengendalian OPT/penanganan DPI, c) Peningkatan sarana pengendalian OPT/penanganan DPI, d) Peningkatan SDM perlindungan dan e) Penguatan kelembagaan perlindungan tanaman pangan.

Berdasarkan kebijakan dan strategi diatas Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan utamanya adalah PPHT, PPDPI, gerakan pengendalian OPT, gerakan penanganan DPI

2.2 Perencanaan Kinerja

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan berpedoman pada Renstra Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024, mengingat penyusunan renstra bertujuan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan upaya pengamanan areal pertanaman dari gangguan OPT dan DPI. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah. Keselarasan Renstra Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2020 – 2024 dengan Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian sasaran produksi.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel. Untuk itu, penting adanya penetapan target kinerja dalam suatu organisasi. Berdasarkan Renstra Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024, target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam periode 2020 – 2024 yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam pengukuran kinerja. Target kinerja Direktorat



Perlindungan Tanaman Pangan disusun berdasarkan target kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Kementerian Pertanian. Pada renstra tahun 2020-2024, terdapat 9 (sembilan) kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan antara lain: Dem area budidaya tanaman sehat dan penanganan DPI, Bantuan sarana pengamatan dan pengendalian OPT serta penanganan DPI, Gerakan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI serta Padat Karya, Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT), Penerapan Penanganan DPI (PPDPI), Pemberdayaan Petani dalam Pemasyarakatan PHT (P4), Pengembangan Agens Hayati (PAH), Rumah Burung Hantu (Rubuha) untuk pengendalian tikus, Pengamatan intensif oleh petugas POPT dan melakukan pengendalian OPT/penanganan DPI serta berperan dalam pemberdayaan petani, dan Pengamanan produksi mendukung kawasan korporasi petani dan food estate dengan pendekatan preemtif dan responsif di tingkat lapangan melibatkan BTPH/LPHP/BPT/POPT/THL POPT, Konstratani/BPP/RPH-RPO sebagai ujung tombak di tingkat lapangan. Namun pada tahun 2024, terdapat 4 kegiatan utama yang dapat dilaksanakan yaitu Bantuan sarana pengamatan dan pengendalian OPT serta penanganan DPI, Gerakan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI, Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT), dan Penerapan Penanganan DPI (PPDPI). Hal ini dikarenakan adanya tiga kali refocusing pagu anggaran pada Tahun 2024. Refocusing pertama yaitu pada bulan Desember 2023 yang semula sejumlah Rp.222.905.010.000 menjadi Rp.168.994.949, refocusing kedua pada bulan Maret 2024 menjadi Rp143.994.949.000, dan refocusing ketiga menjadi Rp144.174.949.000.

2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan peraturan tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen dalam mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan perlindungan tanaman tahun 2024.



Perjanjian Kinerja Direktur Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari 2 sasaran kegiatan dan 4 indikator kinerja beserta targetnya, yang merupakan turunan dari sasaran program dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Indikator Kinerja ditetapkan untuk mengukur kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024. Indikator ini menggambarkan capaian upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan OPT/DPI dan peningkatan mutu produk serta pelayanan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan	Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT (%)	99,5%
		Rasio terkena DPI yang ditangani terhadap luas terkena (%)	70%
		Jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan (LPHP/sertifikat)	2.200
2	Meningkatnya kualitas layanan manajemen unit kerja	Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan <i>stakeholder</i> terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (skala likert)	3,28
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT (skala likert)	3,40

Ket: data luas serangan OPT dan DPI yang digunakan adalah periode Okt 2023 – Sep 2024

Upaya pencapaian sasaran strategis pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan dilakukan melalui beberapa kegiatan penguatan perlindungan tanaman pangan baik di daerah maupun di pusat berupa fasilitas penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI serta pengujian mutu produk tanaman. Alokasi kegiatan utama Penguatan Sistem Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3. Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024

No	Kegiatan Utama	Target	
		Fisik	Anggaran (Rp)
1	PPHT Padi	5 unit	255.000.000
2	Gerdal OPT Serealia	25.000 hektar	10.000.000.000
3	Gerdal OPT Akabi	3.000 hektar	1.800.000.000
4	Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan	13.875 hektar	6.650.000.000
5	Pembuatan Sumur	13.900 hektar	20.850.000.000
6	Pengujian Mutu Produk	2.200 lhp	2.202.269.000
7	Bantuan Pestisida	30.000 hektar	31.206.200.000
8	Akreditasi ISO/IEC 17025	6 unit	1.301.675.000
TOTAL			74.265.144.000

2.4 Pengukuran Indikator Kinerja

a. Rasio Serangan OPT yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terkait rasio serangan OPT yang dapat ditangani diperoleh dengan membandingkan luas serangan OPT yang dapat ditangani dengan total luas serangan. Data luas serangan OPT diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT yang dilaporkan ke Koordinator POPT di tingkat kabupaten/kota setiap dua minggu sekali, kemudian Koordinator POPT melaporkan ke Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan selanjutnya disampaikan ke BPTPH di tingkat provinsi. Rekap data serangan OPT per kabupaten selanjutnya dilaporkan oleh BPTPH ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Pengukuran indikator capaian kinerja Tahun 2024 untuk indikator rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total area terkena menggunakan data serangan OPT periode Oktober 2023 – September 2024 disesuaikan dengan periode pertanaman yang berproduksi pada bulan Januari – Desember 2024.

Rumus perhitungan rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT adalah sebagai berikut:

Rumus perhitungan rasio serangan OPT yang dapat ditangani

$$\frac{\sum \text{Luas terkena OPT yang ditangani (Terkena - puso)} \times 100\%}{\sum \text{Luas terkena OPT}}$$



b. Rasio Terkena DPI yang Ditangani terhadap Luas Terkena DPI

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan terkait rasio terkena DPI yang dapat ditangani diperoleh dengan membandingkan luas terkena DPI yang dapat ditangani dengan total luas terkena akibat DPI. Sama halnya dengan data serangan OPT, Data luas terkena DPI diperoleh dari hasil pengamatan petugas POPT di lapangan yang dilaporkan ke Koordinator POPT di tingkat kabupaten/kota setiap dua minggu sekali, kemudian Koordinator POPT melaporkan ke Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan selanjutnya disampaikan ke BPTPH di tingkat provinsi. Rekap data terkena DPI per kabupaten selanjutnya dilaporkan oleh BPTPH ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Pengukuran indikator capaian kinerja Tahun 2024 untuk indikator rasio terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total area terkena menggunakan data terkena DPI periode Oktober 2023 – September 2024 disesuaikan dengan periode pertanaman yang berproduksi pada bulan Januari – Desember 2024.

Rumus perhitungan rasio Terkena DPI yang dapat ditangani terhadap total luas terkena DPI adalah sebagai berikut:

Rumus perhitungan rasio terkena DPI yang dapat ditangani

$$\frac{\sum \text{Luas terkena DPI yang ditangani (Terkena - puso)} \times 100\%}{\sum \text{Luas terkena DPI}}$$

c. Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Serangan/Terkena OPT/DPI

Perhitungan Realisasi indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rasio serangan/terkena OPT/DPI} \times 100\%}{\sum \text{Luas serangan/terkena OPT/DPI}}$$

d. Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

Perhitungan capaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

$\frac{\text{Target Indikator kinerja} \times 100\%}{\text{Realisasi Indikator Kinerja}}$

e. Jumlah Sertifikasi Hasil Uji Mutu Pestisida, Pupuk dan Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sesuai Permintaan

Capaian jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman diukur berdasarkan realisasi jumlah sertifikat/LHP dibandingkan dengan target.



f. Tingkat Kepuasan Pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan Stakeholder terkait Terhadap Layanan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Tingkat kepuasan pegawai dan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan diukur berdasarkan indeks kepuasan melalui pengisian kuisisioner oleh pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Hasil survei atau pengisian kuisisioner kemudian dihitung menggunakan analisis interval dengan menghitung secara kuantitatif jawaban – jawaban dari responden dan diberi nilai atau skor likert seperti di bawah ini:

- Sangat puas: 4
- Puas: 3
- Tidak puas: 2
- Sangat tidak puas: 1

g. IKM atas Layanan Publik BPMPT

IKM diukur berdasarkan data kuisisioner yang diisi oleh pelanggan BPMPT baik perorangan, instansi pemerintah, swasta dan mahasiswa secara online melalui aplikasi SIJITU. Tujuan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan penyelenggaraan pelayanan pengujian yang dilakukan oleh BPMPT. Survei terdiri dari 9 pertanyaan dengan pilihan jawaban sebanyak 4 kriteria yaitu

- Tidak sesuai (nilai persepsi 1)
- Kurang sesuai (nilai persepsi 2)
- Sesuai (nilai persepsi 3)
- Sangat sesuai (nilai persepsi 4)



III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja

a. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada tahun 2024 mempunyai lima (5) indikator kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel. Indikator tersebut antara lain: rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT; rasio terkena DPI yang ditangani terhadap luas terkena; jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan; tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan; dan IKM atas layanan publik BPMPT (skala likert). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT (%)	99,5	98,99	99,48
2	Rasio terkena DPI yang ditangani terhadap luas terkena (%)	70	76,90	109,85
3	Jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan (LPHP/sertifikat)	2.200	2.801	127,32
4	Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan	3,28	3,405	103,81
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT (Indeks)	3,40	3,53	103,91
				108,88

Sumber data: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan



Berdasarkan indikator kinerja target rasio luas serangan/terkena OPT/DPI yang dapat ditangani terhadap total serangan OPT/DPI adalah minimal 99,5% dan 70%. Realisasi rasio serangan OPT yang dapat ditangani dari gangguan OPT sebesar 98,99% dan DPI sebesar 76,90% sehingga capaian kinerjanya masing-masing adalah 99,48% dan 109,85%. Sedangkan indikator kinerja tingkat kepuasan pelanggan tahun 2024 mencapai 3,53 Skala Likert (103,91%) dengan realisasi jumlah sertifikat pengujian 2.801 LHP (127,32%) dari target sebesar 2.200 LHP. Hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan internal Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2024 periode Triwulan IV dengan analisis skala Likert adalah 3,405 Skala Likert (103,81%).

Penilaian terhadap capaian target indikator kinerja dilakukan dengan metode scoring yang dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil = capaian realisasi >100%
2. Berhasil = capaian realisasi 80 – 100%
3. Cukup Berhasil = capaian realisasi 60 – 79%
4. Kurang Berhasil = capaian realisasi <60%

Berdasarkan metode scoring di atas, maka capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 108,87% masuk dalam kategori Sangat Berhasil (>100%).

b. Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan Rasio terkena DPI yang ditangani terhadap luas terkena

1) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Rerata 5 Tahun

Data perbandingan realisasi indikator kinerja rasio serangan OPT yang dapat ditangani dan rasio luas areal terkena DPI yang dapat ditangani tahun 2024, 2023 dan rerata 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024, Tahun 2023 dan Rerata 5 Tahun

Indikator Kinerja	Tahun 2024 (%)		Tahun 2023 (%)		Rerata 5 Tahun (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1 Rasio Serangan OPT yang dapat ditangani terhadap Total Luas Serangan OPT	99,5	98,99	99,5	99,09	99,5	98,81
2 Rasio Luas Areal terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan Total Areal Terkena DPI	70,0	76,90	70,0	66,63	70,0	73,80

Data periode laporan 10 Januari 2025

Sumber data: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT Tahun 2024 sebesar 98,99%, maka capaian indikator kinerja rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap total luas serangan OPT masuk dalam kategori Berhasil (80%-100%). Begitu juga realisasi indikator kinerja rasio luas areal terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan total areal terkena DPI yaitu sebesar 76,90% (kategori cukup berhasil).

Kontribusi Penyelamatan Produksi Tanaman Pangan Akibat OPT/DPI

Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu negara untuk memastikan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, bergizi dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Konsep ketahanan pangan mencakup beberapa dimensi yang saling terkait termasuk aspek produksi, distribusi, akses dan konsumsi pangan. Saat ini ancaman terhadap ketahanan pangan dapat berasal dari berbagai faktor termasuk perubahan iklim, kebijakan pangan yang tidak tepat, konflik, bencana alam dan faktor ekonomi. Selain itu, penurunan produksi tanaman pangan dan gagal panen (puso) dapat menjadi ancaman bagi pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia. Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan produksi antara lain degradasi kesuburan tanah sawah (kandungan bahan organik rendah), kurangnya ketersediaan pupuk, kurangnya penggunaan varietas unggul baru (VUB) oleh petani, masih kurangnya adopsi teknologi oleh petani, serangan OPT/DPI dan losses lainnya yang disebabkan oleh selain OPT/DPI.



Kontribusi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dalam pengamanan produksi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan perlindungan tanaman pangan seperti PPHT, gerakan pengendalian OPT, gerakan penanganan dampak perubahan iklim, pembuatan sumur, bantuan pestisida, dan Akreditasi ISO/IEC 17025. Melalui kegiatan tersebut diharapkan serangan OPT dan terkena DPI dapat dicegah atau apabila sudah terjadi serangan, maka serangan tersebut dapat dikelola atau ditangani sehingga tidak menyebabkan gagal panen atau puso. Data kontribusi penyelamatan produksi tanaman pangan akibat puso OPT/DPI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Kontribusi Penyelamatan Produksi Tanaman Pangan Akibat OPT/DPI

	OPT	DPI	Total
Provitas (ton/ha)	5,29	5,29	5,29
Luas Terkena (ha)	217.259	362.456	579.714
Luas Puso (ha)	2.612	83.609	86.221
Luas Yang Dapat Ditangani (ha)	214.647	278.846	493.493
Produksi Yang Diselamatkan (ton)	1.135.454	1.475.061	2.610.515
% Produksi Yang Diselamatkan*	2,14	2,78	4,91
Pengurangan Produksi Akibat Puso (ton)	13.816	442.281	456.097
% Pengurangan Produksi Akibat Puso*	0,03	0,83	0,86

Data produksi yang digunakan = 53.142.727 ton

Data tersebut merupakan angka tetap KSA BPS (angka tetap KSA BPS 3 Februari 2025)

Sumber data serangan OPT dan terkena DPI: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan data pada tabel, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada tahun 2024 berhasil menangani total areal seluas 493.493 ha dari serangan OPT dan terkena DPI pada tanaman padi sehingga tidak menjadi puso. Produksi yang dapat diselamatkan dari total areal tersebut adalah 2.610.515 ton (4,91%). Apabila tidak dilakukan penanganan OPT dan DPI pada areal tersebut melalui pelaksanaan kegiatan perlindungan, maka dapat menyebabkan puso dengan kerugian produksi mencapai 456.097 ton (0,86%).

2) Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024 per Komoditas

Rasio serangan OPT yang dapat ditangani dan rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani dihitung menggunakan data serangan OPT dan terkena DPI yang tidak puso pada tujuh komoditas unggulan tanaman pangan yaitu: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.



Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024 per Komoditas

Indikator Kinerja		Komoditas	Terkena (Ha)	Puso (Ha)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio Serangan OPT yang dapat ditangani terhadap Total Luas Serangan OPT	a. Padi	217.259	2.612	99,6	98,80	99,19
		b. Jagung	56.288	62	99,6	99,89	100,29
		c. Kedelai	804	119	96,4	85,20	88,38
		d. Kacang Tanah	1.046	-	96,4	100,00	103,73
		e. Kacang Hijau	184	-	96,4	100,00	103,73
		f. Ubi Kayu	750	9	96,4	98,76	102,44
		g. Ubi Jalar	69	-	96,4	100,00	103,73
		Total	276.400	2.802	99,5	98,99	99,48
2	Rasio Luas Areal terkena DPI yang dapat ditangani dibandingkan Total Areal Terkena DPI	a. Padi	362.456	83.609	70	76,93	109,90
		b. Jagung	49.442	11.662	70	76,41	109,16
		c. Kedelai	300	167	70	44,29	63,27
		d. Kacang Tanah	870	6	70	99,33	141,90
		e. Kacang Hijau	168	20	70	88,12	125,89
		f. Ubi Kayu	31	11	70	62,72	89,60
		g. Ubi Jalar	3	1	70	100,00	142,86
		Total	413.268	95.477	70	76,90	109,85

Ket : T= Terkena, P = Puso, Update tanggal 10 Januari 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase areal yang dapat ditangani akibat serangan OPT apabila dibandingkan dengan total luas serangan OPT berkisar 85,20% sampai dengan 100% dengan persentase tertinggi adalah komoditas kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar sedangkan terendah pada komoditas kedelai. Persentase areal yang dapat ditangani akibat dampak perubahan iklim (banjir dan kekeringan) berkisar antara 44,29% sampai dengan 100% dengan persentase tertinggi terjadi pada komoditas ubi jalar dan terendah pada komoditas kedelai.

• Komoditas Padi

Capaian realisasi kinerja rasio serangan OPT yang dapat diselamatkan tahun 2024, 2023 dan rerata 5 tahun pada komoditas padi dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 8. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Padi Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	247.970	3.403	233.030	2.345	217.259	2.612
Banjir & Kekeringan (DPI)	358.649	98.959	363.070	126.098	362.456	83.609
Areal terselamatkan OPT	244.567		230.684		214.647	
Areal terselamatkan DPI	259.690		236.973		278.846	
Nilai IK (%) OPT	98,63		98,99		98,80	
Nilai IK (%) DPI	72,4078		65,27		76,93	
TARGET IK (%) OPT	99,6		99,6		99,6	
TARGET IK (%) DPI	70		70		70	
Capaian (%) OPT	99,02		99,39		99,19	
Capaian (%) DPI	103,44		93,24		109,90	

Data periode laporan 10 Januari 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama seluas 217.259 ha, dan yang mengalami puso seluas 2.612 ha. Berdasarkan hal tersebut, maka realisasi luas areal pertanaman padi yang dapat ditangani dari serangan OPT adalah 214.647 ha atau mencapai 98,80% dari total luas areal terserang OPT. Luas areal pertanaman padi yang terkena DPI tahun 2024 seluas 362.456 ha, dengan luas yang mengalami puso sebesar 83.609 ha. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa realisasi luas areal pertanaman padi yang dapat ditangani dari total luas areal yang terkena DPI seluas 278.846 ha atau mencapai 76,93%.

Realisasi capaian indikator kinerja pengamanan produktivitas padi dari serangan OPT pada tahun 2024 mencapai 99,19%. Sedangkan untuk pengamanan terhadap DPI tahun 2024 mencapai 109,90%. Namun secara umum capaian rasio luas terserang OPT dan terkena DPI yang dapat ditangani pada tahun 2024, 2023 dan rerata 5 tahun pada tanaman padi masuk ke dalam kategori berhasil (80 - 100%).



- **Komoditas Jagung**

Capaian realisasi kinerja rasio serangan OPT yang dapat diselamatkan tahun 2023, 2022 dan rerata 5 tahun pada komoditas jagung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Jagung Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	58.504	240	49.712	79	56.288	62
Banjir & Kekeringan (DPI)	50.409	7.617	69.718	18.117	49.442	11.662
Areal terselamatkan OPT	58.264		49.633		56.227	
Areal terselamatkan DPI	42.792		51.601		37.779	
Nilai IK (%) OPT	99,6		99,8		99,9	
Nilai IK (%) DPI	84,9		74,0		76,4	
TARGET IK (%) OPT	99,6		99,6		99,6	
TARGET IK (%) DPI	70		70		70	
Capaian (%) OPT	100,0		100,2		100,3	
Capaian (%) DPI	121,3		105,7		109,2	

Data periode laporan 10 Januari 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Tahun 2024 luas areal pertanaman jagung yang terserang OPT adalah 56.288 ha dan 62 ha diantaranya puso, sehingga luas areal yang dapat diselamatkan adalah 56.227 ha atau 99,9%. Berdasarkan hasil perhitungan, apabila dibandingkan dengan target rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani sebesar 99,6% maka nilai capaian kinerja pada tahun 2024 adalah 100,3%. Capaian tersebut lebih tinggi dari tahun 2023 (100,2%) dan lebih tinggi dari rerata 5 tahun (100,0%).

Luas areal pertanaman jagung yang terkena DPI sebesar 49.442 ha dan terjadi puso seluas 11.662 ha, sehingga luas areal yang dapat ditangani atau tidak puso seluas 37.779 ha atau 76,4%. Capaian kinerja rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani pada komoditas jagung tahun 2024 apabila dibandingkan target 70,0% adalah sebesar 109,2%. Capaian tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (105,7%) namun lebih rendah dari rerata 5 tahun 121,3%. Namun secara umum capaian rasio luas terserang OPT



dan terkena DPI yang dapat ditangani pada tahun 2024, 2023 dan rerata 5 tahun pada tanaman jagung masuk ke dalam kategori sangat berhasil (>100%).

- **Komoditas Kedelai**

Target luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama Oktober 2023 – September 2024 sebesar 96,4% dan terkena DPI sebesar 70,0%. Capaian indikator kinerja rasio serangan OPT yang dapat diselamatkan tahun 2024, 2023 dan rerata 5 tahun pada komoditas kedelai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kedelai Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	1.116	22	1.037	170	804	119
Banjir & Kekeringan (DPI)	2.493	1.074	1.292	601	300	167
Areal terselamatkan OPT	1.094		867		685	
Areal terselamatkan DPI	1.419		691		133	
Nilai IK (%) OPT	98,1		83,6		85,2	
Nilai IK (%) DPI	56,9		53,5		44,3	
TARGET IK (%) OPT	96,4		96,4		96,4	
TARGET IK (%) DPI	70		70		70	
Capaian (%) OPT	101,7		86,7		88,4	
Capaian (%) DPI	81,3		76,4		63,3	

Data periode laporan 10 Januari 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Pada periode Oktober 2023 – September 2024, luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama seluas 804 ha dan 119 ha diantaranya mengalami puso. Dengan demikian, luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT Tahun 2024 seluas 685 ha atau mencapai 85,2%. Luas areal pertanaman kedelai yang terkena DPI seluas 300 ha dan luas puso mencapai 167 ha. Realisasi luas areal pertanaman kedelai yang dapat diamankan dari total luas terkena DPI Tahun 2024 seluas 133 ha atau mencapai 44,3%.

Dengan demikian, realisasi capaian indikator kinerja pengamanan pertanaman kedelai dari gangguan OPT pada tahun 2024 mencapai 88,4% dari target sebesar 96,4%, capaian tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan pada tahun 2023 (86,7%) dan lebih rendah dari rerata 5 tahun (101,7%). Pengamanan



tanaman kedelai dari DPI mencapai 63,3% dari target sebesar 70,0%, lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2023 (76,4%) dan lebih rendah apabila dibandingkan rerata 5 tahun (81,3%).

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman kedelai dari serangan OPT, banjir dan kekeringan dari tahun ke tahun mencapai kategori kurang berhasil hingga sangat berhasil dengan kisaran capaian sebesar 63,3% – 101,7%.

• Komoditas Kacang Tanah

Tahun 2024 luas areal pertanaman kacang tanah yang terserang OPT adalah 1.046 ha dan tidak terjadi puso, sehingga realisasi rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani untuk komoditas tersebut adalah 100%. Capaian realisasi kinerja rasio serangan OPT yang dapat diselamatkan tahun 2024, 2023 dan rerata 5 tahun pada komoditas kacang tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Tanah Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	1.156	1	1.445	-	1.046	-
Banjir & Kekeringan (DPI)	1.960	134	564	161	870	6
Areal terselamatkan OPT	1.155		1.445		1.046	
Areal terselamatkan DPI	1.825		403		864	
Nilai IK (%) OPT	99,9		100,0		100	
Nilai IK (%) DPI	93,1		71,4		99,3	
TARGET IK (%) OPT	96,4		96,4		96,4	
TARGET IK (%) DPI	70		70		70	
Capaian (%) OPT	103,6		103,7		103,7	
Capaian (%) DPI	133,1		102,0		141,9	

Data periode laporan 10 Januari 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan hasil perhitungan maka didapatkan capaian indikator rasio luas serangan OPT yang ditangani untuk komoditas kacang tanah apabila dibandingkan dengan target 2024 sebesar 96,4% adalah 103,7%. Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena DPI sebesar 870 ha dan yang mengalami puso seluas 6 ha. Berdasarkan data tersebut, maka realisasi luas areal pertanaman kacang tanah yang dapat ditangani dari total luas terkena DPI



tahun 2024 sebesar 864 ha atau mencapai 99,3%. Bila dibandingkan dengan target sebesar 70,0%, maka realisasi capaian indikator kinerja pengamanan areal pertanaman dari DPI mencapai 141,9%. Berdasarkan data pada Tabel 11 capaian kinerja rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani untuk komoditas kacang tanah pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 (103,7%) dan lebih tinggi dari rerata 5 tahun (103,6%), sedangkan untuk capaian pengamanan terhadap DPI pada tahun 2024 (141,9%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 (102,0%) dan rerata 5 tahun (133,1%).

Secara umum, capaian kinerja pengamanan pertanaman dari serangan OPT dan DPI dari tahun ke tahun mencapai kategori sangat berhasil dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,0 hingga 141,9% sehingga masuk ke dalam kategori sangat berhasil (>100%).

- **Komoditas Kacang Hijau**

Target luas areal pertanaman kacang hijau yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama tahun 2024 minimal sebesar 96,4% dan terkena DPI minimal 70,0%. Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama pada periode Oktober 2023 – September 2024 seluas 184 ha dan tidak ada kejadian puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang hijau yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT Tahun 2024 yaitu seluas 184 ha atau mencapai 100%. Luas terkena banjir dan kekeringan (DPI) dilaporkan seluas 168 ha dengan jumlah puso seluas 20 ha. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman kacang hijau yang dapat ditangani dari total luas terkena DPI tahun 2024 seluas 148 ha atau mencapai 88,12%. Perbandingan capaian tahun sebelumnya dan rerata lima tahun dapat dilihat pada tabel 12.



Tabel 12. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Kacang Hijau Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	146	5	290	-	184	-
Banjir & Kekeringan (DPI)	3.383	1.527	262	156	168	20
Areal terselamatkan OPT	141		290		184	
Areal terselamatkan DPI	1.856		106		148	
Nilai IK (%) OPT	96,57		100,00		100,00	
Nilai IK (%) DPI	54,86		40,56		88,12	
TARGET IK (%) OPT	96,4		96,4		96,4	
TARGET IK (%) DPI	70		70		70	
Capaian (%) OPT	100,17		103,73		103,73	
Capaian (%) DPI	78,38		57,94		125,89	

Data periode laporan 10 Januari 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Areal pertanian yang dapat diamankan dari serangan OPT sebesar 100% dari target 96,4% sehingga capaian indikatornya sebesar 103,73%. Areal pertanian yang dapat diamankan dari DPI sebesar 88,12% dengan capaian indikator sebesar 125,89%. Capaian indikator kinerja OPT tahun 2024 (103,73%) sama dengan tahun 2023 (103,73%) namun lebih tinggi dari rerata 5 tahun (100,17%). Capaian kinerja DPI tahun 2024 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2023 (57,94%) dan rerata 5 tahun (78,38%) (Tabel 12). Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pengamanan tanaman kacang hijau terhadap OPT dan DPI tahun 2024 masuk ke kategori sangat berhasil (>100%).

• Komoditas Ubi Kayu

Target luas areal pertanian ubi kayu yang dapat diamankan dari total luas serangan OPT utama minimal sebesar 96,4% dan terkena DPI minimal 70,0% untuk DPI. Capaian realisasi kinerja rasio serangan OPT yang dapat diselamatkan tahun 2024, 2023 dan rerata 5 tahun pada komoditas ubi kayu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 13. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Kayu Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September).

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	1.031	5	746	6	750	9
Banjir & Kekeringan (DPI)	616	82	42	3	31	11
Areal terselamatkan OPT	1.027		740		741	
Areal terselamatkan DPI	534		40		19	
Nilai IK (%) OPT	99,55		99,25		98,76	
Nilai IK (%) DPI	86,63		94,10		62,72	
TARGET IK (%) OPT	96,4		96,4		96,4	
TARGET IK (%) DPI	70		70		70	
Capaian (%) OPT	103,26		102,95		102,44	
Capaian (%) DPI	123,76		134,43		89,60	

Data periode laporan 10 Januari 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Tahun 2024 luas areal pertanian ubi kayu yang terkena serangan OPT utama seluas 750 ha dan yang mengalami puso seluas 9 ha. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanian ubi kayu yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT Tahun 2024 seluas 741 ha atau mencapai 98,76%.

Luas areal terkena DPI pada ubi kayu tahun 2024 dilaporkan mencapai 31 ha dan yang mengalami puso sebesar 11 ha. Dengan demikian, luas areal pertanian ubi kayu yang dapat ditangani dari total luas terkena DPI Tahun 2024 mencapai 19 ha atau 62,72%.

Realisasi capaian pengamanan OPT ubi kayu sebesar 102,44% dari target yang telah ditetapkan yaitu 96,4% dan capaian pengamanan dari DPI sebesar 89,60% dari target sebesar 70,0%. Capaian kinerja untuk rasio OPT yang dapat ditangani pada ubi kayu tahun 2024 lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2023 (102,95%) dan rerata 5 tahun (103,26%). Luas terkena DPI pada tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 (134,43%) dan rerata 5 tahun (123,76%). Pengamanan tanaman ubi kayu dari gangguan OPT dan DPI dari tahun ke tahun masuk dalam kategori berhasil - sangat berhasil (89,60 – 134,43%).

• **Komoditas Ubi Jalar**

Target luas areal pertanian ubi jalar yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT utama pada tahun 2024 minimal sebesar 96,4% dan terkena DPI minimal sebesar 70,0%. Capaian realisasi kinerja rasio serangan OPT yang



dapat diselamatkan tahun 2024, 2023 dan rerata 5 tahun pada komoditas ubi jalar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan Luas Serangan OPT Utama dan DPI pada Tanaman Ubi Jalar Tahun 2024, 2023 dan Rerata 5 Tahun (Oktober – September)

	RERATA 5 TAHUN		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
Luas OPT (Ha)	260	0	149	-	69	-
Banjir & Kekeringan (DPI)	29	5	17	0	2,75	1,25
Areal terselamatkan OPT	260		149		69	
Areal terselamatkan DPI	24		16		1,50	
Nilai IK (%) OPT	100,00		100,00		100,00	
Nilai IK (%) DPI	82,23		97,62		54,55	
TARGET IK (%) OPT	96,4		96,4		96,4	
TARGET IK (%) DPI	70		70		70	
Capaian (%) OPT	103,73		103,73		103,73	
Capaian (%) DPI	117,47		139,46		77,92	

Data periode laporan 10 Januari 2025

Sumber data: Database Luas Serangan OPT dan Terkena DPI Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Tahun 2024 luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama sebesar 69 ha, dan dilaporkan tidak terjadi puso. Dengan demikian, realisasi luas areal pertanaman ubi jalar yang dapat ditangani dari total luas serangan OPT seluas 69 ha atau mencapai 100%. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan target maka capaian pengamanan tanaman ubi jalar terhadap serangan OPT adalah 103,73%. Capaian tersebut sama dengan capaian pada tahun 2023 (103,73) dan rerata 5 tahun (103,73%). Capaian realisasi pengamanan ubi jalar tahun 2024 termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Pertanaman ubi jalar pada tahun 2024 yang terkena DPI sebesar 2,75 ha dan yang dilaporkan mengalami puso sebesar 1,25 ha, sehingga luas areal yang dapat diamankan seluas 1,50 ha (54,55%). Apabila dibandingkan dengan target sebesar 70,0% maka realisasi tersebut mencapai 77,92% dan masuk ke dalam kategori berhasil.



3) Jumlah sertifikasi hasil uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida sesuai permintaan

Pelaksanaan sertifikasi hasil uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida dilaksanakan oleh BPMPT, yang merupakan unit pelaksana teknis dibina oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta pupuk dan pestisida. Perhitungan capaian indikator kinerja jumlah sertifikasi hasil uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida sesuai permintaan dilakukan dengan membandingkan jumlah pengujian yang telah dilakukan oleh BPMPT pada tahun 2024 dengan target yaitu 2.200 LHP/sertifikat. Tahun 2024 BPMPT telah menyelesaikan pengujian dan menerbitkan LHP/sertifikat sebanyak 2.801 atau persentase realisasi mencapai 127,32% apabila dibandingkan dengan target. Capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat berhasil. Target dan realisasi jumlah sertifikasi hasil uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pupuk dan pestisida sesuai permintaan tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15. Perbandingan Jumlah Sertifikasi Hasil Uji Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta Pupuk dan Pestisida BPMPT Tahun 2020 – 2024

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	
2020	1.600	1.615	100,94%
2021	1.750	2.499	142,80%
2022	2.500	2.538	101,52%
2023	2.525	3.085	122,18%
2024	2.200	2.801	127,32%

Sumber data: Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun 2024 melebihi target (127,32%). Selain itu pencapaian target pada tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023 (122,18%).



4) Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Perhitungan capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan berupa tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan *stakeholder* terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dilakukan dengan membandingkan hasil analisis skala likert dengan target tahun 2024 sebesar 3,28. Data yang digunakan untuk perhitungan skala likert adalah hasil survei tingkat kepuasan layanan internal Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang meliputi layanan keuangan dan perbendaharaan, layanan kepegawaian, layanan umum (surat masuk dan surat keluar), layanan rumah tangga dan perlengkapan, layanan operasional kantor serta layanan sarana dan prasarana. Hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan internal Subbagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2024 adalah 3,405 atau mencapai 103,81% apabila dibandingkan dengan target, dan masuk ke dalam kategori sangat berhasil.

5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT

Hasil pengolahan data kuesioner terhadap pelanggan yang mengisi survei online BPMPT didapatkan nilai SKM sebesar 3,415 skala likert dengan nilai konversi SPM 85,37 sehingga mendapat nilai mutu pelayanan/kinerja kategori Baik. Data indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPMPT tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BPMPT Tahun 2020 – 2024

Tahun	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi	
2020	3,38	3,33	98,61%
2021	3,38	3,38	100,06%
2022	3,38	3,38	100,00%
2023	3,40	3,42	100,44%
2024	3,40	3,53	103,91%

Sumber data: Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman



Berdasarkan data di atas, kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan BPMPT kepada masyarakat dan realisasi indikator kinerja BPMPT sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mengalami peningkatan (**hasil perhitungan sembilan nilai unsur pelayanan BPMPT dapat dilihat dalam lampiran 24**).

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada data yang tersaji dalam Tabel 17. Target jangka menengah yang digunakan merupakan target tahun 2024 pada dokumen Renstra Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Rasio Serangan OPT yang ditangani terhadap Luas Serangan OPT (%)	75,8	98,98	130,59
2	Rasio terkena DPI yang ditangani terhadap luas terkena (%)	60,8	76,90	126,48
3	Jumlah sertifikasi hasil uji mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai permintaan (LPHP/sertifikat)	2.550	2.801	109,84
4	Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholder terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (skala likert)	3,28	3,41	103,81
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT (Indeks)	3,40	3,53	103,91
				114,93

Sumber data: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan data pada tabel di atas, realisasi indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target



jangka menengah adalah 114,93% atau sangat berhasil (>100%), dan semua indikator yang ada dapat dicapai dengan kategori sangat berhasil.

3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke-i} / RVK_{ke-i}}{PAK_{ke-i} / TVK_{ke-i}} \right)}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

RVK : Realisasi volume keluaran

RAK : Realisasi anggaran per keluaran

TVK : Target volume keluaran

PAK : Pagu anggaran per keluaran

n : Jumlah jenis keluaran

Semakin sedikit anggaran yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja yang maksimal, maka nilai efisiensinya semakin tinggi. Jika rasio penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk menghasilkan satu satuan capaian output kegiatan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sudah efisien, dan begitu pula sebaliknya. Hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap capaian output kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 18. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kegiatan Utama Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024

No	Keluaran (output)		Volume keluaran		Anggaran (Rp)		RAK/RVK	PAK/TVK	1- (RAK/RVK)/ (PAK/TVK)
	Item keluaran	Satuan keluaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK)	Pagu Anggaran per Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran per Keluaran (RAK)			
1	PPHT Padi	unit	5	5	255.000.000	254.475.000	50.895.000	51.000.000	0,21%
2	Gerdal OPT Sereal	hektar	25.000	25.000	10.000.000.000	10.000.000.000	400.000	400.000	0,00%
3	Gerdal OPT Akabi	hektar	3.000	3.000	1.800.000.000	1.799.970.739	599.990	600.000	0,00%
4	Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan	hektar	13.875	13.816	6.650.000.000	6.633.632.847	480.141	479.279	-0,18%
5	Pembuatan Sumur	hektar	13.900	13.900	20.850.000.000	20.850.000.000	1.500.000	1.500.000	0,00%
6	Pengujian Mutu Produk	lhp	2.200	2.801	2.202.269.000	2.191.599.000	782.434	1.001.031	21,84%
7	Bantuan Pestisida	hektar	30.000	30.000	31.206.200.000	30.971.913.750	1.032.397	1.040.207	0,75%
8	Akreditasi ISO/IEC 17025 dan Sertifikasi ISO 9001	unit	6	6	1.301.675.000	1.291.693.898	215.282.316	216.945.833	0,77%
Total								23,38%	
Rata - Rata Efisiensi								Efisiensi	2,13%

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan



Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan sumberdaya di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan kegiatan utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024 sebagian besar sudah efisien karena nilai rata-rata efisiensi (2,13), kecuali kegiatan Gerakan Penanganan DPI. Hal tersebut dikarenakan adanya keterlambatan pencairan anggaran sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan dan sisa dana dikembalikan ke negara. Efisiensi penggunaan sumberdaya tertinggi terdapat pada kegiatan pengujian mutu produk karena realisasi fisik pelaksanaan kegiatan tersebut lebih dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peralatan dan sarana laboratorium tergolong baru dan baik sehingga dapat mempercepat proses pengujian. Selain itu didukung dengan adanya aplikasi pengujian online SIJITU yang memudahkan pelanggan dalam melakukan pengujian secara online, mengirimkan sampel melalui ekspedisi dan dapat mengunduh sertifikat Laporan Hasil Pengujian sehingga pelanggan tidak perlu datang langsung.

3.3. Realisasi Kegiatan

Capaian indikator kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan hasil dari pelaksanaan beberapa kegiatan utama perlindungan tanaman pangan Tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Realisasi Kegiatan Utama Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024

Kegiatan Utama	Target		Realisasi		Capaian (%)	
	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran
1 PPHT Padi	5 unit	255.000.000	5	254.475.000	100	99,79
2 Gerdal OPT Serealia	25.000 hektar	10.000.000.000	25.000	10.000.000.000	100	100
3 Gerdal OPT Akabi	3.000 hektar	1.800.000.000	3.000	1.799.970.739	100	100
4 Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan	13.875 hektar	6.650.000.000	13.816	6.633.632.847	99,57	99,75
5 Pembuatan Sumur	13.900 hektar	20.850.000.000	13.900	20.850.000.000	100	100
6 Pengujian Mutu Produk	2.200 lhp	2.202.269.000	2.801	2.191.599.000	127,32	99,52
7 Bantuan Pestisida	30.000 hektar	31.206.200.000	30.000	30.971.913.750	100	99,25
8 Akreditasi ISO/IEC 17025	6 unit	1.301.675.000	6	1.291.693.898	100	99,23

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan



a. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Padi

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) diartikan sebagai upaya pengendalian populasi dan tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang pada Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 390/Kpts/TP.600/5/1994 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Nasional PHT.



Penerapan PHT dilakukan melalui pendekatan partisipatoris dengan cara mendorong petani untuk dapat menyampaikan pendapat dan ide-idenya secara aktif sehingga petani mampu menyelesaikan permasalahan dan membuat keputusan terkait pengelolaan agroekosistem di pertanamannya. Penerapan PHT tersebut memerlukan komponen teknologi, sistem pemantauan yang tepat, dan petugas atau petani yang terampil dalam penerapan teknologi PHT. Tindakan pengendalian OPT yang didasarkan atas analisis agroekosistem ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi tanaman pangan pada tahun 2024.

Penerapan pengendalian hama terpadu (PPHT) merupakan kegiatan pemasyarakatan PHT di tingkat petani yang memberdayakan petani alumni SLPHT dan mengikutsertakan petani non alumni SLPHT. Kegiatan PPHT Tahun 2024 dilaksanakan pada komoditas padi. Tujuan dilaksanakannya kegiatan PPHT antara lain:



01

Menumbuhkan prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani dalam melakukan pengendalian OPT dan pengelolaan agroekosistemnya sesuai dengan prinsip PHT

02

Mengimplementasikan PHT dalam mengamankan areal pertanaman dari gangguan OPT

Penerapan Pengelolaan Hama Terpadu (PPHT) skala luas padi merupakan kegiatan pemasyarakatan PHT di tingkat petani untuk memberdayakan petani alumni SLPHT dan mengikutsertakan petani non alumni SLPHT. Penerapan pengelolaan hama terpadu dilaksanakan pada areal hamparan yang luas, yang dilaksanakan oleh satu kelompok tani pada hamparan seluas 25 ha tanpa batas wilayah administratif.

Kegiatan PPHT meliputi kegiatan persiapan yang dilakukan dalam bentuk pertemuan dalam rangka koordinasi antara kelompok tani pelaksana dengan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, petugas pendamping dan stake holder lainnya. Pertemuan koordinasi ini dilanjutkan dengan pertemuan perencanaan yang dilakukan sebagai persiapan kegiatan untuk merancang pola budidaya tanaman sehat yang akan diterapkan dan menyusun strategi pengelolaan OPT berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan potensi lokal yang dimiliki. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti yaitu pengamatan dan pertemuan mingguan sebanyak 12 kali dalam satu musim tanam (dari pra tanam sampai panen).

Pertemuan mingguan ini diisi dengan bimbingan teknis mengenai budidaya tanaman sehat sesuai prinsip PHT, pengamatan lapangan/lahan sawah, diskusi dan evaluasi hasil pengamatan lapangan, serta pengambilan keputusan/tindak lanjut dari hasil evaluasi hasil pengamatan lapangan. Kegiatan penutup dari PPHT padi adalah farm field day (FFD), yang merupakan pameran (ekspose) hasil-hasil kegiatan, rencana tindak lanjut dan lain-lain selama kegiatan PPHT berlangsung.

Target dan realisasi kegiatan PPHT Padi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 20. Realisasi Kegiatan PPHT Padi

No.	Gerakan Pengendalian	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Penerapan PHT Padi (Ha)	5	255.000.000	5	100	254.475.000	99,79
	Jumlah	5	255.000.000	5	100	254.475.000	99,79

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan PPHT Padi seluas 125 ha adalah Rp255.000.000 dengan realisasi fisik sebesar 5 unit (100%) dan realisasi anggaran Rp254.475.000 (99,79%).

b. Gerakan Pengendalian OPT

Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan dilaksanakan dalam rangka mengamankan produksi tanaman pangan. Gerakan pengendalian OPT diutamakan dengan menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan yang didasarkan pada pertimbangan ekologi agar tidak mengakibatkan resistensi dan resurgensi OPT, serta tidak membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan.

Gerakan pengendalian OPT merupakan salah satu bentuk teknis kegiatan pengelolaan OPT untuk mengendalikan serangan OPT agar populasi/intensitas serangannya berada pada tingkat yang aman dan tidak menimbulkan kerugian.

Pelaksanaan gerakan pengendalian OPT didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui jenis dan kepadatan populasi OPT, luas dan intensitas serangan OPT, daerah penyebaran, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil pengamatan dianalisis untuk menentukan langkah-langkah pengendalian OPT yang tepat.



Teknis kegiatan gerakan pengendalian OPT dilakukan secara *pre-emptif* berupa gerakan pengendalian OPT yang pelaksanaannya melibatkan petani, petugas, dan masyarakat secara langsung, dilaksanakan secara bersama-sama pada areal yang luas (minimal 5 ha), dan mengutamakan penggunaan bahan pengendalian OPT/cara pengendalian yang ramah lingkungan. Bahan pengendalian OPT yang digunakan berupa APH/pestisida biologi/pestisida nabati yang dihasilkan oleh kelompok tani maupun lembaga perlindungan tanaman pangan baik disediakan secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah. Apabila serangan OPT tidak dapat dikendalikan maka pestisida kimia dapat digunakan sebagai langkah terakhir. Bentuk kegiatan gerakan pengendalian OPT antara lain:

1. gerakan pengambilan & pengumpulan kelompok telur hama penggerek batang;
2. gropyokan dan pengemposan tikus;
3. gerakan pengumpanan tikus;
4. aplikasi/Penyemprotan massal pestisida biologi/pestisida nabati untuk mengendalikan OPT tanaman pangan.

Tujuan dilaksanakannya gerdal OPT antara lain:



Mengendalikan OPT dalam rangka mendukung pengamanan produksi tanaman pangan

Menggerakkan petani dan elemen masyarakat lainnya untuk melakukan pengendalian OPT.

Pada tahun 2024 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan kegiatan Gerdal OPT adalah sebagai berikut:



Gerakan Pengendalian OPT Serealia

- **Target Fisik:** 25.000 ha
- **Target Anggaran:**
Rp 10.000.000.000



Gerakan Pengendalian OPT Akabi

- **Target Fisik:** 3.000 ha
- **Target Anggaran:**
Rp 1.800.000.000



Kegiatan gerakan pengendalian OPT yang dilaksanakan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2024 terdiri dari gerakan pengendalian OPT serealisa dan gerakan pengendalian OPT akabi, dengan alokasi berturut-turut sebesar Rp10.000.000.000 dan Rp1.800.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan seluas 25.000 ha dan 3.000 ha. Realisasi kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 21. Realisasi Kegiatan Gerakan Pengendalian OPT

No.	Gerakan Pengendalian	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Gerakan Pengendalian OPT Serealisa (Ha)	25.000	10.000.000.000	25.000	100	10.000.000.000	100
2	Gerakan Pengendalian OPT Akabi (Ha)	3.000	1.800.000.000	3.000	100	1.799.970.739	100
Jumlah		28.000	11.800.000.000	28.000	100	11.799.970.739	100

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan tabel di atas, realisasi fisik dan keuangan kegiatan gerakan pengendalian OPT serealisa mencapai 100% yaitu sebesar Rp10.000.000.000 ha untuk pelaksanaan kegiatan seluas 25.000 ha. Demikian juga dengan kegiatan gerakan pengendalian OPT akabi realisasi fisik dan kegiatan mencapai 100% yaitu Rp1,799.970.739 untuk pelaksanaan kegiatan seluas 3.000 ha.

c. Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim



Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan berkomitmen memotivasi petani untuk dapat meminimalkan resiko kehilangan hasil dengan tetap dapat melakukan budidaya tanaman pangan dalam kondisi perubahan iklim yang semakin ekstrem. Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim diselenggarakan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan untuk membantu petani agar dapat menangani dan mengantisipasi kerusakan akibat perubahan iklim ekstrim secara mandiri untuk mendukung pencapaian target pengamanan produksi tanaman pangan.



Kegiatan Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan merupakan upaya pengamanan pertanaman pangan dari banjir/kekeringan, melalui biaya operasional pompanisasi saat olah tanah atau pengawalan standing crops atau normalisasi/perbaikan sarana pengaliran/penampung air/biopori atau integrasi dari kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan petani/masyarakat sekitar lokasi serta petugas pendamping Pengendali Organisme Tumbuhan (POPT), Penyuluh Lapangan (PPL), petugas dari BPTPH dan/atau Dinas Pertanian.

Gerakan Penanganan Dampak Perubahan Iklim bertujuan untuk :

01. Membantu petani dalam upaya penanganan banjir/kekeringan di lahan usaha taninya sehingga tetap dapat melakukan budidaya tanaman pangan dalam kondisi ekstrem.
02. Meminimalkan resiko kehilangan hasil akibat DPI serta mendukung pencapaian target pengamanan produksi tanaman pangan.

Tabel 22. Realisasi Kegiatan Gerakan Penanganan DPI

No.	Jenis Kegiatan	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Gerakan Penanganan DPI (Banjir/Kekeringan) (Ha)	13.875	6.650.000.000	13.816	99,57	6.633.632.847	99,75
Jumlah		6.650.000.000		6.633.632.847		99,75	

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp6.650.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Penanganan DPI seluas 13.875 ha. Realisasi fisik kegiatan penanganan DPI sampai dengan Desember 2024 seluas 13.816 ha (99,57%) dan anggaran sebesar Rp6.633.632.847 (99,75%).



d. Bantuan Sumur



Sebagai upaya pengamanan produksi tanaman pangan dari gangguan DPI, seperti banjir, kekeringan, dan bencana alam, pada tahun anggaran 2024 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sumur. Bantuan tersebut diharapkan menjadi solusi bagi petani dalam upaya mengantisipasi kekeringan.

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menyiapkan langkah operasional di tingkat lapangan untuk mengantisipasi kejadian banjir/kekeringan, sehingga pelaku usaha budidaya tanaman pangan dapat beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim ekstrim. Salah satu upaya adaptasi DPI adalah pembuatan sumur. Bantuan yang diterima oleh kelompok tani atau gabungan kelompok tani penerima manfaat untuk pelaksanaan kegiatan pembuatan sumur adalah uang sebesar Rp.1.500.000/ha dengan minimal luasan 25 hektar per kelompok yang disalurkan melalui mekanisme transfer ke rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani.

Bantuan dapat digunakan untuk pembelanjaan alat/bahan yang diperlukan, jasa pembuatan oleh pihak ketiga, dan upah tenaga kerja yang terlibat. Alat/bahan pembuatan sumur terdiri dari mesin pompa air, pipa pvc, elbow pvc, lem paralon, selang/pipa, instalasi listrik (untuk pompa tenaga listrik), material bangunan, dan bahan bakar/token listrik pompa. Kedalaman sumur disesuaikan dengan ketersediaan dan kebutuhan air tanah di masing-masing lahan. Jumlah titik sumur disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan/atau dana yang tersedia.

Pengadaan sarana penanganan DPI tersebut disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani/gapoktan yang dituangkan dalam



Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan diketahui oleh petugas pendamping, yaitu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) serta Penyuluh Pertanian. Rincian biaya masing- masing sarana yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani/gabungan kelompok tani dan harga setempat. Jika dana Bantuan Pemerintah tidak mencukupi, kelompok tani/gabungan kelompok tani dapat memenuhi kebutuhan sarana tersebut secara swadaya.

Tabel 23. Realisasi Kegiatan Bantuan Sumur

No.	Jenis Kegiatan	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Pembuatan sumur	13.900	20.850.000.000	13.900	100,00	20.850.000.000	100,00
Jumlah			20.850.000.000			20.850.000.000	100,00

Tahun 2024 Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20.850.000.000 untuk melaksanakan kegiatan pembuatan sumur pada areal seluas 13.900 ha. Realisasi anggaran pembuatan sumur tahun 2024 sebesar Rp20.850.000.000 (100,00%) dengan realisasi fisik sebesar 13.900 ha (100,00%)

e. Pengujian Mutu Produk

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) telah melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2024. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, tugas utama BPMPT yaitu melaksanakan pengujian mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida. Dalam melaksanakan pengujian, laboratorium BPMPT telah terakreditasi dan menerapkan sistem mutu sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 17025: 2017.

Sesuai dengan ruang lingkup pengujian, BPMPT telah melakukan pengujian mutu pestisida (kandungan bahan aktif dan uji fisiko kimia), kandungan beberapa unsur makro pada pupuk, serta kandungan residu pestisida pada produk tanaman. Analisis dilakukan terhadap sampel yang disampaikan oleh pelanggan, terdiri dari instansi pemerintah dan swasta (pihak eksternal) serta hasil pemantauan yang



dilakukan staf BPMPT ke berbagai daerah (internal). Sesuai perpanjangan akreditasi per 17 Oktober 2022, terjadi penambahan ruang lingkup pengujian, sehingga ruang Lingkup pengujian BPMPT terdiri dari:

- 1) Pengujian mutu pestisida, meliputi: pengujian kadar bahan aktif
- 2) Pengujian mutu pupuk, meliputi:
 - Pengujian pupuk Urea, NPK padat, KCl, SP-36, Amonium sulfat
 - Pengujian sifat fisiko-kimia yang terdiri dari pengujian kadar air
- 3) Pengujian mutu produk tanaman, meliputi:
 - Pengujian residu pestisida
 - Pengujian mikotoksin (aflatoksin B1, B2, G1 dan G2)
 - Pengujian cemaran logam berat (Pb, Cd, Hg, As,)
 - Pengujian mutu pangan (mutu beras,)

Realisasi pengujian sampel pelanggan dan monitoring Tahun 2024 mencapai 2.801 sertifikat LHP atau sebesar 127,32% dari target 2.200 sertifikat LHP. Realisasi anggaran BPMPT Tahun 2024 mencapai Rp2.191.599.000 (99,52%) dari pagu anggaran sebesar Rp2.202.269.000. Realisasi PNBPN tahun 2024 sebesar Rp. 776.561.000,- atau mencapai 93,56% dari target sebesar Rp.830.000.000,-. Tarif jasa pengujian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.



f. Bantuan Pestisida

Pengamanan tanaman pangan dari gangguan OPT dan peningkatan produksi tanaman dapat tercapai tanpa merusak kelestarian lingkungan salah satunya dengan penerapan PHT. PHT merupakan upaya pengelolaan populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih strategi pengendalian untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan. Sistem PHT dilaksanakan dengan menerapkan dua upaya pengendalian, yaitu *pre-emptif* dan responsif.



Pengendalian *pre-emptif* dilakukan melalui budidaya tanaman sehat, pengaturan pola tanam, penggunaan varietas unggul toleran OPT, pemupukan berimbang, pengamatan OPT secara intensif, pemberdayaan musuh alami/agens pengendali hayati (APH), gropyokan, pengolahan tanah sempurna dan gerakan pengendalian menggunakan bahan pengendali ramah lingkungan (agens hayati/pestisida biologi, pestisida nabati). Pengendalian responsif dilakukan melalui gerakan pengendalian dengan menggunakan APH, pestisida biologi, pestisida nabati, atau pestisida kimiawi secara tepat (tepat sasaran, tepat jenis, tepat dosis dan konsentrasi, tepat waktu, tepat cara aplikasi, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat alat), cukup jumlah dan kualitasnya serta mudah diakses.

Pengendalian OPT perlu didukung oleh sarana pengendalian yang memadai. Keterbatasan sarana dapat menyebabkan upaya pengendalian OPT tidak berjalan dengan baik. Ketersediaan sarana pendukung sangat diperlukan agar pengendalian OPT dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Salah satu sarana pengendalian OPT yang perlu disediakan adalah bahan pengendali OPT atau pestisida.

Bantuan pestisida pada Tahun 2024 ini di alokasikan ke beberapa daerah/provinsi dan langsung kepada kelompok-kelompok tani yang telah



ditetapkan dalam daftar calon petani calon lokasi (CPCL) penerima bantuan pemerintah. Tujuan kegiatan bantuan pestisida ini adalah:

- ➔ Menyediakan dan mendistribusikan bantuan pestisida nabati, biologi/APH, kimia, dan bahan pengasapan ke daerah/ provinsi, dan kepada kelompok -kelompok tani terpilih untuk mengendalikan OPT pada tanaman pangan;
- ➔ Mengamankan areal pertanaman pangan dari serangan OPT

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada Tahun 2024, mengalokasikan kegiatan pengadaan sarana pengendalian OPT berupa pestisida nabati/pestisida biologi dan rodentisida dan insektisida kimia untuk pengendalian OPT sebagai stok persediaan (*buffer stock*) seluas 30.000 ha, dengan pagu anggaran Rp31.206.200.000. Realisasi kegiatan pengadaan pestisida tahun 2024 seluas 30.000 ha (100%) dengan serapan anggaran mencapai Rp30.971.913.750 (99,25%).

g. Akreditasi ISO/IEC 17025

Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP/LAH) merupakan salah satu lembaga perlindungan yang mampu memproduksi pupuk hayati dan APH. Pupuk hayati dan APH yang diproduksi oleh LPHP/LAH merupakan hasil isolasi bagian tanaman/media tumbuh yang diduga memiliki kemampuan membunuh/mencegah/meningkatkan kinerja metabolisme sekunder. Sebagian besar kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pupuk hayati dan APH yang dihasilkan oleh LPHP/LAH relatif tidak stabil, sehingga tidak mampu bersaing dengan swasta. Salah satu upaya untuk menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pupuk hayati dan APH yang dihasilkan oleh LPHP/LAH adalah kegiatan Akreditasi ISO/IEC 17025.



Akreditasi ISO/IEC 17025 kepada LPHP/LAH bertujuan agar produk yang dihasilkan terutama pupuk hayati dan APH memenuhi permintaan dan sesuai dengan standar internasional, sehingga mampu bersaing dengan produk swasta. Tujuan pelaksanaan akreditasi ISO/IEC 17025 adalah untuk mendorong LPHP/LAH untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan standard internasional yang ditetapkan dan dapat bersaing dengan produk swasta/lembaga lainnya.

Tahun 2024 kegiatan akreditasi ISO/IEC 17025 dilaksanakan di LPHP 6 provinsi dengan anggaran sebesar Rp1.301.675.000,-. Realisasi anggaran kegiatan akreditasi 17025 tahun 2024 sebesar Rp1.283.743.898 (98,6%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Kegiatan Akreditasi ISO/IEC 17025

No.	Jenis Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Akreditasi ISO/IEC 17025 LPHP di Provinsi Sumatera Utara	157.500.000	157.256.889	99,8
2	Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi ISO/IEC 17025 LPHP di Provinsi Jawa Timur	104.775.000	104.458.640	99,7
3	Akreditasi ISO/IEC 17025 LPHP di Provinsi Sumatera Selatan	314.628.000	311.627.976	99,0
4	Akreditasi ISO/IEC 17025 LPHP di Provinsi Kalimantan Selatan	270.944.000	260.836.836	96,3
5	Akreditasi ISO/IEC 17025 LPHP di Provinsi Gorontalo	301.928.000	301.459.020	99,8
6	Akreditasi ISO/IEC 17025 LPHP di Provinsi Sulawesi Utara	151.900.000	148.104.537	97,5
Jumlah		1.301.675.000	1.283.743.898	98,6

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan akreditasi ISO/IEC 17025 di LPHP dapat terlaksana dengan capaian realisasi anggaran berkisar antara 96,3 - 99,8%.

h. Capaian Indikator Lainnya

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Peran sektor pertanian diantaranya adalah tulang punggung dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, keamanan pangan, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan wanita dan kesejahteraan sosial. Mengingat pentingnya sektor pertanian maka perlu mendapatkan perhatian dan dukungan untuk memastikan keberlanjutannya.



Sektor pertanian sering menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani. Beberapa masalah utama yang sering muncul pada sektor pertanian antara lain: perubahan cuaca ekstrem, serangan hama dan penyakit, kurangnya akses terhadap sumberdaya, pola tanam tidak berkelanjutan, perubahan demografi, ketidakstabilan harga, kesenjangan infrastruktur dan kesulitan dalam pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, organisasi nirlaba, dan petani. Hal ini juga termasuk investasi dalam teknologi pertanian inovatif, pendidikan dan pelatihan bagi petani, kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur pedesaan yang memadai.

Kementerian Pertanian, sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang ditugaskan oleh Presiden sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, memiliki tugas untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberdayakan petani yang tergolong keluarga miskin ekstrem.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani.
- c. Melakukan upaya produksi komoditas pertanian untuk mencapai ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Adanya Reformasi Birokrasi Tematik terkait Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, sekaligus dengan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2022, mendorong Kementerian Pertanian untuk membuat kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam mendukung program tersebut adalah:

- a. Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
- b. kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
- c. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses permodalan, dan akses penggunaan lahan.



- d. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
- e. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

Terkait hal tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mendapat *dynamic tagging* pada kegiatan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI dengan alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 25. Realisasi Kegiatan yang mendapatkan *dynamic tagging*

Kegiatan Utama	Target			Realisasi		Capaian (%)	
	Fisik		Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran
1 Gerdal OPT Serealia	25.000	hektar	10.000.000.000	25.000	10.000.000.000	100	100
2 Gerdal OPT Akabi	3.000	hektar	1.800.000.000	3.000	1.799.970.739	100	100
3 Gerakan Penanganan Banjir/Kekeringan	13.875	hektar	6.650.000.000	13.816	6.633.632.847	99,57	99,75
4 Pembuatan Sumur	13.900	hektar	20.850.000.000	13.900	20.850.000.000	100	100

3.4. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024, di pusat didukung dengan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sedangkan di daerah didukung dengan anggaran yang tertuang dalam DIPA Dana Dekonsentrasi melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH). Satker Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (Pusat) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp96.302.269.000. Realisasi Keuangan (SP2D) penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar Rp95.065.675.333 (98,72%), sebagaimana tercantum pada tabel 26.



Tabel 26. Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

SUBSTANSI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI SP2D	
		Rp	%
	96.302.269.000	95.065.675.333	98,72
SUB BAGIAN TATA USAHA	646.100.000	642.508.720	99,44
KELOMPOK DATA DAN KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN	2.050.000.000	2.027.895.141	98,92
KELOMPOK SUBSTANSI PENGENDALIAN OPT SEREALIA	60.703.900.000	59.535.471.071	98,08
KELOMPOK SUBSTANSI PENGENDALIAN OPT AKABI	2.200.000.000	2.199.817.831	99,99
KELOMPOK SUBSTANSI PENANGGULANGAN DPI	28.500.000.000	28.468.383.570	99,89
BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN	2.202.269.000	2.191.599.000	99,52

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Realisasi Dana Dekonsentrasi tahun 2024 sebesar Rp47.778.642.368 (99,80%) dari pagu anggaran sebesar Rp47.872.680.000. Alokasi dan realisasi anggaran DIPA Dana Dekonsentrasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 27. Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

No	Provinsi	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Keuangan SP2D	%
	Nasional	47.872.680.000	47.778.642.368	99,80
1	Aceh	2.908.560.000	2.893.935.275	99,50
2	Sumatera Utara	3.264.720.000	3.263.498.780	99,96
3	Sumatera Barat	1.166.120.000	1.160.866.600	99,55
4	Riau	1.490.320.000	1.482.039.821	99,44
5	Jambi	1.465.440.000	1.465.421.950	100
6	Sumatera Selatan	1.312.880.000	1.312.861.850	100
7	Bengkulu	213.160.000	213.131.000	99,99
8	Lampung	1.520.160.000	1.520.050.010	99,99
9	Kep. Bangka Belitung	78.000.000	78.000.000	100
10	Kep. Riau	78.000.000	77.590.000	99,47
11	DKI Jakarta	54.000.000	52.500.000	97,22
12	Jawa Barat	2.552.000.000	2.551.741.308	99,99
13	Jawa Tengah	4.381.800.000	4.381.799.500	100
14	DI Yogyakarta	360.000.000	360.000.000	100
15	Jawa Timur	2.753.320.000	2.752.680.952	99,98
16	Banten	490.160.000	490.150.000	100
17	Bali	342.000.000	341.847.214	99,96
18	Nusa Tenggara Barat	1.219.760.000	1.219.760.000	100
19	Nusa Tenggara Timur	1.837.160.000	1.834.334.000	99,85
20	Kalimantan Barat	573.160.000	571.905.880	99,78
21	Kalimantan Tengah	1.421.480.000	1.416.534.600	99,65
22	Kalimantan Selatan	1.625.440.000	1.605.282.100	98,76
23	Kalimantan Timur	1.226.280.000	1.205.781.000	98,33
24	Kalimantan Utara	90.720.000	90.295.400	99,53
25	Sulawesi Utara	1.310.280.000	1.307.201.000	99,77
26	Sulawesi Tengah	1.699.760.000	1.699.065.100	99,96
27	Sulawesi Selatan	3.713.680.000	3.709.803.128	99,90
28	Sulawesi Tenggara	1.651.360.000	1.650.605.900	99,95
29	Gorontalo	1.248.480.000	1.245.570.000	99,77
30	Sulawesi Barat	1.121.560.000	1.121.480.000	99,99
31	Maluku	1.107.400.000	1.107.400.000	100
32	Maluku Utara	1.201.640.000	1.201.630.000	100
33	Papua Barat	1.443.920.000	1.443.920.000	100
34	Papua	949.960.000	949.960.000	100

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan



Realisasi seluruh kegiatan Pusat dan Dekonsentrasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan berhasil meraih peringkat kedua pada lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yaitu sebesar 99,08% atau Rp142.844.317.863 dari pagu Rp144.174.949.000. Realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

KEGIATAN/ ESELON II	PAGU DIPA	REALISASI SP2D	
	3.278.835.155.000	3.100.217.967.884	94,55%
1 BBPOPT	15.574.898.000	14.546.050.508	93,39%
2 PERLINDUNGAN	144.174.949.000	142.844.317.863	99,08%
3 PENGOLAHAN PEMASARAN HASIL TP	620.000.000.000	602.448.790.185	97,17%
4 PERBENIHAN	1.564.084.765.000	1.539.628.861.125	98,44%
5 BBPPMBTPH	12.093.479.000	10.990.037.724	90,88%
6 DUKUNGAN MANAJEMEN	140.803.592.000	92.816.851.849	65,92%
7 SEREALIA	775.303.472.000	690.152.695.216	89,02%
8 ANEKA KACANG UMBI	6.800.000.000	6.790.363.414	99,86%

Sumber data: Realisasi Anggaran Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan



3.5. Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut

Permasalahan

- Blokir anggaran yang menyebabkan kegiatan PPHT dimulai menjelang tengah tahun anggaran, sehingga penyiapan CPCL kegiatannya menjadi terburu-buru.
- CPCL dapat mengalami perubahan menyesuaikan kondisi serangan OPT dan terkena DPI, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu sesuai yang telah ditargetkan.
- Kegiatan perlindungan tanaman pangan sangat tergantung kondisi alam dan tidak dapat diprediksi, yang menyebabkan target/realisasi kegiatan seperti gerakan pengendalian OPT dan gerakan penanganan DPI tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI di lapangan dikarenakan adanya penambahan dokumen persyaratan kegiatan berupa SPTJM.
- Proses administrasi pencairan anggaran membutuhkan waktu yang relatif lama.
- Adanya keterlambatan penyampaian informasi kejadian DPI.
- Penetapan titik pembuatan tidak tepat karena tidak ditemukan sumber air sehingga harus mencari titik sumur pengganti.
- Adanya beberapa kali proses refocusing dan self blocking anggaran kegiatan juga turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Permintaan bantuan rubuha dari daerah belum bisa dipenuhi karena adanya pengurangan anggaran.



Upaya Tindak Lanjut

- Segera mengidentifikasi dan mempercepat proses pengajuan CPCL pengganti berikut kelengkapan dokumen administrasinya apabila CPCL yang telah diusulkan sebelumnya tidak dapat melaksanakan kegiatan.
- Meminimalisir perubahan CPCL di pertengahan kegiatan dengan memastikan CPCL yang diajukan dari daerah sudah diverifikasi dan dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Kemudian CPCL pengganti harus segera diajukan untuk mempercepat proses perbaikan administrasi terkait perubahan CPCL tersebut.
- Menyampaikan kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan dari awal tahun
- Melakukan pengawalan terhadap kelengkapan dokumen administrasi dan koordinasi intensif dengan pihak yang terkait dalam proses pencairan anggaran.
- Menyampaikan prediksi kejadian DPI ke petugas lapangan agar dapat lebih fokus ke daerah rawan di wilayah masing-masing dan memantau informasi kejadian DPI dari berbagai media.
- Monitoring dan evaluasi yang intensif dan optimal terhadap semua pelaksanaan kegiatan sehingga betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran.
- Menyampaikan informasi kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk lebih proaktif melakukan identifikasi CPCL yang tepat dalam upaya percepatan penanganan DPI.
- Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan mendorong petani dan pemerintah desa untuk melaksanakan gerakan masyarakat (germas) pembuatan rubuha secara swadaya maupun menggunakan dana desa



**Faktor
Pendukung
Keberhasilan
Pelaksanaan
Kegiatan Tahun
2024**

- Kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan di lapangan seperti PPHT, Gerdal OPT, Gerakan Penanganan DPI, pembuatan sumur, bantuan pestisida dan lainnya dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari semua pihak, antara lain aparat desa dan pemerintah setempat serta masyarakat sekitar.
- Antisipasi dan Mitigasi DPI dilakukan sejak dini oleh semua pihak terkait, upaya adaptasi dan penanganan DPI dilakukan secara komprehensif, efisien dan efektif.
- Pelaksanaan pengamatan OPT yang dilakukan secara teratur, rutin dan intensif, serta tindakan pengendalian serangan OPT yang dilakukan sejak dini (pre-emptif) secara masif dapat lebih mengendalikan gangguan OPT di lapangan sehingga dapat menekan kejadian eksplosif serangan OPT dan risiko kerugian hasil.
- Anggaran 2024 terbatas sehingga laboratorium berupaya mencari solusi agar target bisa tercapai dengan anggaran yang ada. Salah satu cara dengan mengganti metode pengujian yang semula duplo (dua kali ulangan) menjadi simplo (satu kali ulangan), tetapi tetap dengan mengedepankan akurasi dan presisi. Pada setiap pengujian tetap menyertakan Sampel Jaminan Mutu (Quality Control Sample) dan pada setiap batch pengujian dilakukan satu kali sample duplo. Apabila sampel jaminan mutu memasuki kriteria yang telah ditetapkan, maka semua sampel dianggap telah memenuhi syarat. Perubahan metode ini telah didiskusikan dengan KAN BSN dan narasumber ahli, telah diperbolehkan selama klausul 7 pada ISO/IEC 17025:2017 mengenai parameter yang harus laboratorium kerjakan sebagai bagian penjaminan mutu telah masuk prosedur terkait penjaminan mutu.
- Aplikasi pengujian online SIJITU yang selalu diperbaharui, guna mempermudah pelanggan melakukan pendaftaran pengujian secara online, mengirimkan sampel melalui ekspedisi dan dapat mengunduh sertifikat Laporan Hasil Pengujian (LHP), sehingga pelanggan tidak perlu datang langsung. Selain melalui aplikasi online SIJITU, BPMPPT juga masih memberlakukan pelayanan pengujian secara offline sesuai Standar Pelayanan Publik untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala pada jaringan.



- Pasundan Bandung) yang menguji mutu produk tanaman sebanyak 209 sampel dan dikenai tarif 50 % (total 209 sampel membayar sebesar Rp. 54.850.000 jika harga normal Rp. 99.700.000).

Sampel yang masuk berasal dari penelitian akhir tugas mahasiswa S2 (Institut Pertanian Bogor) yang menguji mutu beras dan cemaran logam total 123 sampel dan dikenai tarif 75 % (total 123 sampel membayar sebesar Rp. 5.625.000 jika harga normal Rp.7.500.000).

Potensi seharusnya didapat dari selisih tarif yang dibayarkan mahasiswa S1 dan S2 sebesar Rp. 56.725.000,-. Sehingga jika semua harga normal total PNBP menjadi Rp.833.286.000,- (melebihi target yang ditetapkan).

Pada tahun 2024 laboratorium tidak memberikan layanan trial terhadap senyawa baru yang diajukan pelanggan karena anggaran yang terbatas, pada kegiatan trial metode baru dibutuhkan bahan, solven maupun gas tambahan. Sampel pelanggan baru ini berpotensi menambah PNBP.



**Rekomendasi
Pelaksanaan
Kegiatan
Tahun 2025**

- Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti bimbingan teknis dan pelatihan untuk peningkatan pelayanan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga.
- Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data khususnya data spasial.
- Perlu adanya peningkatan kapasitas petugas lapangan dalam bidang pengendalian/penanganan OPT/DPI berbasis ramah lingkungan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- Penambahan alokasi kegiatan dan anggaran kegiatan PPHT, gerdal OPT, dan kegiatan lainnya untuk mendukung pengamanan produksi tanaman pangan,
- Perlu adanya peningkatan kualitas dan kemampuan keterampilan sumber daya manusia (SDM) perlindungan tanaman pangan melalui bimbingan teknis (Bimtek), pelatihan, workshop, dan seminar/webinar untuk mendukung dan menguatkan kegiatan perlindungan tanaman pangan,
- Perlu adanya pemasyarakatan kegiatan-kegiatan perlindungan tanaman pangan yang berbasis ramah lingkungan di tingkat lapang/petani/kelompok tani.
- Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala dan terukur agar dapat lebih efektif dan efisien.
- Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Permentan No 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.



IV. PENUTUP

Capaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sasaran kegiatan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Pengukuran capaian kinerja kegiatan perlindungan tanaman pangan tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan termasuk dalam kategori sangat berhasil dengan capaian kinerja sebesar 108,88%. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator OPT/DPI berturut-turut sebesar 99,48% dan 109,85%. Keberhasilan dalam pengamanan areal pertanaman tanaman pangan tersebut juga dapat menjadi indikator adanya manfaat dari kegiatan pengamatan, pencegahan dan pengendalian serangan OPT/DPI yang telah dilakukan. Keberhasilan lain juga terlihat dari indikator kinerja pada aspek pelayanan yaitu capaian jumlah sertifikasi hasil uji mutu sebesar 127,32%, tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik BPMPT sebesar 103,91% dan tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga sebesar 103,81%. Keberhasilan ini dicapai dengan dukungan anggaran pusat sebesar Rp96.302.269.000,-, dengan realisasi penggunaan anggaran tahun 2024 sebesar Rp95.065.675.333,- (98,72%). Selain itu juga ada dukungan anggaran Dana Dekonsentrasi sebesar Rp47.872.680.000,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp47.778.642.368,- atau sebesar 99,80%.

Keberhasilan pengamanan tanaman pangan dari gangguan OPT/DPI juga tidak terlepas dari peran seluruh petugas baik di pusat maupun di daerah dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap para petani dalam hal prinsip budidaya tanaman sehat, pengelolaan hama terpadu dan respon cepat dalam penanggulangan dampak perubahan iklim yang terjadi di lapangan. Selain itu, kelembagaan perlindungan turut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain pelaksanaan kegiatan dengan mendorong dinas Provinsi/Kabupaten untuk proaktif terhadap identifikasi kebutuhan yang tepat dalam upaya penanganan OPT/DPI di lapangan; melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif dan optimal



terhadap semua pelaksanaan kegiatan sehingga bermanfaat dan tepat sasaran; serta meningkatkan koordinasi dan sosialisasi mengenai pengendalian OPT dan penerapan sistem PHT baik kepada petani maupun petugas di lapangan.



LAMPIRAN



Lampiran 1.

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

JALAN AUP No. 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
KOTAK POS 7264 & 7301 : JKS-PSM
TELEPON (021) 7806819, 7824069, FAKSIMILE (021) 7806309
WEBSITE : <http://www.deptan.go.id/djptan>

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmat

Jabatan : Direktur Perlindungan Tanaman Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Suwandi

Jabatan : Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Suwandi
NIP. 196703231992031003

Jakarta, Maret 2024

Pihak Pertama,

Rachmat
NIP. 198011272005011001



Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas serangan OPT dan terkena DPI	1. Rasio serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%)	99,5
		2. Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)	70
2.	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan <i>stakeholder</i> terkait terhadap layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (Skala Likert)	3,28

Kegiatan
Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan

Anggaran (000)
Rp. 168.994.949

Direktur Jenderal,



Suwandi
NIP. 196703231992031003

Jakarta, Maret 2024
Direktur Perlindungan Tanaman Pangan,



Rachmat
NIP. 198011272005011001



Lampiran 2.

LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN PADI OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

Ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		Capaian Kinerja (%)
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	
1	Aceh	5.524	-	5.524	100,00	100,40
2	Sumatera Utara	8.313	0	8.312	100,00	100,40
3	Sumatera Barat	2.358	77	2.281	96,74	97,13
4	Riau	2.439	26	2.414	98,94	99,34
5	Jambi	1.286	5	1.281	99,59	99,99
6	Sumatera Selatan	13.273	150	13.123	98,87	99,27
7	Bengkulu	2.526	5	2.521	99,80	100,20
8	Lampung	6.704	13	6.691	99,81	100,21
9	Kep. Bangka Belitung	1.323	22	1.300	98,31	98,70
10	Kep. Riau	3	-	3	100,00	100,40
11	DKI Jakarta	15	-	15	100,00	100,40
12	Jawa Barat	42.514	223	42.291	99,48	99,87
13	Jawa Tengah	33.142	368	32.775	98,89	99,29
14	DI Yogyakarta	4.651	235	4.416	94,96	95,34
15	Jawa Timur	10.785	158	10.628	98,54	98,93
16	Banten	7.767	342	7.425	95,59	95,98
17	Bali	3.820	186	3.634	95,14	95,53
18	Nusa Tenggara Barat	5.875	3	5.872	99,95	100,35
19	Nusa Tenggara Timur	6.751	8	6.743	99,89	100,29
20	Kalimantan Barat	3.138	19	3.119	99,39	99,79
21	Kalimantan Tengah	2.366	16	2.350	99,33	99,73
22	Kalimantan Selatan	782	45	737	94,28	94,66
23	Kalimantan Timur	6.221	14	6.207	99,77	100,17
24	Kalimantan Utara	209	-	209	100,00	100,40
25	Sulawesi Utara	1.014	-	1.014	100,00	100,40
26	Sulawesi Tengah	8.064	64	8.000	99,20	99,60
27	Sulawesi Selatan	11.597	477	11.120	95,88	96,27
28	Sulawesi Tenggara	14.111	134	13.977	99,05	99,45
29	Gorontalo	2.161	-	2.161	100,00	100,40
30	Sulawesi Barat	5.071	10	5.062	99,81	100,21
31	Maluku	2.017	2	2.015	99,90	100,30
32	Maluku Utara	558	10	548	98,21	98,60
33	Papua Barat	503	-	503	100,00	100,40
34	Papua	374	-	374	100,00	100,40
Jumlah		217.259	2.612	214.647	98,80	99,19

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 3.

LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN JAGUNG OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		Capaian Kinerja (%)
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	
1	Aceh	2.006	-	2.006	100,00	100,40
2	Sumatera Utara	2.754	0	2.754	100,00	100,40
3	Sumatera Barat	140	-	140	100,00	100,40
4	Riau	168	-	168	100,00	100,40
5	Jambi	89	-	89	100,00	100,40
6	Sumatera Selatan	3.241	12	3.229	99,63	100,03
7	Bengkulu	858	-	858	100,00	100,40
8	Lampung	4.743	0	4.743	99,99	100,40
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	1	-	1	100,00	100,40
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1.041	2	1.039	99,81	100,21
13	Jawa Tengah	6.442	10	6.432	99,84	100,25
14	DI Yogyakarta	2.788	-	2.788	100,00	100,40
15	Jawa Timur	2.251	11	2.240	99,49	99,89
16	Banten	371	-	371	100,00	100,40
17	Bali	190	-	190	100,00	100,40
18	Nusa Tenggara Barat	2.056	-	2.056	100,00	100,40
19	Nusa Tenggara Timur	7.835	5	7.830	99,94	100,34
20	Kalimantan Barat	517	0	517	100,00	100,40
21	Kalimantan Tengah	13	-	13	100,00	100,40
22	Kalimantan Selatan	59	-	59	100,00	100,40
23	Kalimantan Timur	2.943	9	2.934	99,69	100,09
24	Kalimantan Utara	103	-	103	100,00	100,40
25	Sulawesi Utara	733	3	730	99,59	99,99
26	Sulawesi Tengah	4.199	1	4.198	99,98	100,38
27	Sulawesi Selatan	3.207	3	3.204	99,91	100,31
28	Sulawesi Tenggara	1.129	3	1.126	99,73	100,13
29	Gorontalo	2.618	-	2.618	100,00	100,40
30	Sulawesi Barat	3.191	-	3.191	100,00	100,40
31	Maluku	66	-	66	100,00	100,40
32	Maluku Utara	134	-	134	100,00	100,40
33	Papua Barat	145	-	145	100,00	100,40
34	Papua	259	2	257	99,23	99,63
Jumlah		56.288	62	56.227	99,89	100,29

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 4.

LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN KEDELAI OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		Capaian Kinerja (%)
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	
1	Aceh	28	-	28	100,00	103,73
2	Sumatera Utara	6	-	6	100,00	103,73
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	2	-	2	100,00	103,73
5	Jambi	3	-	3	100,00	103,73
6	Sumatera Selatan	3	-	3	100,00	103,73
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	2	-	2	100,00	103,73
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	20	-	20	100,00	103,73
13	Jawa Tengah	130	-	130	100,00	103,73
14	DI Yogyakarta	50	-	50	100,00	103,73
15	Jawa Timur	23	-	23	100,00	103,73
16	Banten	60	-	60	100,00	103,73
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	201	-	201	100,00	103,73
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	0	-	0	100,00	103,73
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	0	-	0	100,00	103,73
23	Kalimantan Timur	2	-	2	100,00	103,73
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	106	-	106	100,00	103,73
27	Sulawesi Selatan	133	119	14	10,53	10,92
28	Sulawesi Tenggara	25	-	25	100,00	103,73
29	Gorontalo	8	-	8	100,00	103,73
30	Sulawesi Barat	1	-	1	100,00	103,73
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	1	-	1	100,00	103,73
Jumlah		804	119	685	85,20	88,38

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 5.

LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN KACANG TANAH OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		Capaian Kinerja (%)
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	
1	Aceh	9	-	9	100,00	103,73
2	Sumatera Utara	130	-	130	100,00	103,73
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	12	-	12	100,00	103,73
5	Jambi	18	-	18	100,00	103,73
6	Sumatera Selatan	8	-	8	100,00	103,73
7	Bengkulu	15	-	15	100,00	103,73
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	1	-	1	100,00	103,73
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	1	-	1	100,00	103,73
13	Jawa Tengah	9	-	9	100,00	103,73
14	DI Yogyakarta	16	-	16	100,00	103,73
15	Jawa Timur	228	-	228	100,00	103,73
16	Banten	10	-	10	100,00	103,73
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	62	-	62	100,00	103,73
19	Nusa Tenggara Timur	26	-	26	100,00	103,73
20	Kalimantan Barat	86	-	86	100,00	103,73
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	2	-	2	100,00	103,73
23	Kalimantan Timur	6	-	6	100,00	103,73
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	36	-	36	100,00	103,73
26	Sulawesi Tengah	159	-	159	100,00	103,73
27	Sulawesi Selatan	116	-	116	100,00	103,73
28	Sulawesi Tenggara	87	-	87	100,00	103,73
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	1	-	1	100,00	103,73
31	Maluku	0	-	0	100,00	103,73
32	Maluku Utara	0	-	0	100,00	103,73
33	Papua Barat	1	-	1	100,00	103,73
34	Papua	11	-	11	100,00	103,73
Jumlah		1.046	-	1.046	100,00	103,73

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 6.

LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN KACANG HIJAU OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		Capaian Kinerja (%)
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	1	-	1	100,00	103,73
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	0	-	0	100,00	103,73
5	Jambi	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	1	-	1	100,00	103,73
7	Bengkulu	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	2	-	2	100,00	103,73
13	Jawa Tengah	134	-	134	100,00	103,73
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	9	-	9	100,00	103,73
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	28	-	28	100,00	103,73
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	9	-	9	100,00	103,73
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	1	-	1	100,00	103,73
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	0	-	0	100,00	103,73
31	Maluku	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-
34	Papua	1	-	1	100,00	103,73
Jumlah		184	-	184	100,00	103,73

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 7.

LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN UBI KAYU OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		Capaian Kinerja (%)
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	
1	Aceh	5	-	5	100,00	103,73
2	Sumatera Utara	130	-	130	100,00	103,73
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	28	-	28	100,00	103,73
5	Jambi	5	0	5	99,61	103,33
6	Sumatera Selatan	18	-	18	100,00	103,73
7	Bengkulu	2	-	2	100,00	103,73
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	45	-	45	100,00	103,73
10	Kep. Riau	4	0	4	92,92	96,39
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	8	-	8	100,00	103,73
13	Jawa Tengah	22	-	22	100,00	103,73
14	DI Yogyakarta	2	-	2	100,00	103,73
15	Jawa Timur	93	-	93	100,00	103,73
16	Banten	13	-	13	100,00	103,73
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	199	9	190	95,48	99,04
20	Kalimantan Barat	27	-	27	100,00	103,73
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	0	-	0	100,00	103,73
23	Kalimantan Timur	30	-	30	100,00	103,73
24	Kalimantan Utara	1	-	1	100,00	103,73
25	Sulawesi Utara	41	-	41	100,00	103,73
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	3	-	3	100,00	103,73
28	Sulawesi Tenggara	27	-	27	100,00	103,73
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	28	-	28	100,00	103,73
31	Maluku	13	-	13	100,00	103,73
32	Maluku Utara	4	-	4	100,00	103,73
33	Papua Barat	1	-	1	100,00	103,73
34	Papua	-	-	-	-	-
Jumlah		750	9	741	98,76	102,44

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 8.

LUAS SERANGAN OPT UTAMA PADA TANAMAN UBI JALAR OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

ha

No	Provinsi	Luas Serangan (LS)		Areal Terselamatkan		Capaian Kinerja (%)
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	1	-	1	100,00	103,73
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4	Riau	3	-	3	100,00	103,73
5	Jambi	1	-	1	100,00	103,73
6	Sumatera Selatan	0	-	0	100,00	103,73
7	Bengkulu	10	-	10	100,00	103,73
8	Lampung	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	0	-	0	100,00	103,73
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	7	-	7	100,00	103,73
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	2	-	2	100,00	103,73
16	Banten	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	3	-	3	100,00	103,73
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	0	-	0	100,00	103,73
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	24	-	24	100,00	103,73
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	7	-	7	100,00	103,73
29	Gorontalo	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	1	-	1	100,00	103,73
31	Maluku	1	-	1	100,00	103,73
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	9	-	9	100,00	103,73
34	Papua	-	-	-	-	-
Jumlah		69	-	69	100,00	103,73

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 9.

LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN PADI OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

Ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	13.407	2.202	11.205	83,57	7.495	1.397	6.099	81,37
2	Sumatera Utara	6.052	1.481	4.570	75,53	2.185	-	2.185	100,00
3	Sumatera Barat	6.299	1.162	5.138	81,56	494	7	486	98,49
4	Riau	2.949	607	2.342	79,41	655	30	625	95,42
5	Jambi	15.691	2.884	12.807	81,62	8.658	416	8.241	95,19
6	Sumatera Selatan	4.522	1.505	3.017	66,72	1.183	90	1.093	92,43
7	Bengkulu	289	21	268	92,73	679	50	629	92,63
8	Lampung	9.580	3.818	5.762	60,15	7.669	1.760	5.909	77,05
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	62	15	47	75,61
10	Kep. Riau	-	-	-	-	1	1	-	-
11	DKI Jakarta	6	1	5	79,76	-	-	-	-
12	Jawa Barat	15.873	1.152	14.721	92,74	21.380	2.297	19.083	89,26
13	Jawa Tengah	40.389	18.878	21.511	53,26	51.155	10.135	41.020	80,19
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	4.263	528	3.735	87,61
15	Jawa Timur	14.710	648	14.062	95,60	33.030	8.351	24.679	74,72
16	Banten	2.474	291	2.183	88,22	3.586	240	3.345	93,30
17	Bali	27	-	27	100,00	696	168	528	75,89
18	Nusa Tenggara Barat	270	41	229	84,80	4.752	492	4.260	89,65
19	Nusa Tenggara Timur	135	7	129	95,20	1.146	134	1.012	88,31
20	Kalimantan Barat	953	102	851	89,28	25	-	25	100,00
21	Kalimantan Tengah	1.972	140	1.832	92,90	2.029	4	2.025	99,80
22	Kalimantan Selatan	5.073	2.161	2.912	57,41	225	54	171	75,96
23	Kalimantan Timur	45	22	23	51,11	2.387	-	2.387	100,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	1.824	7	1.816	99,60	91	10	81	88,82
26	Sulawesi Tengah	1.615	240	1.375	85,13	2.274	121	2.154	94,70
27	Sulawesi Selatan	40.572	15.964	24.607	60,65	7.657	1.068	6.589	86,05
28	Sulawesi Tenggara	5.554	901	4.652	83,77	2.937	1.115	1.822	62,05
29	Gorontalo	3.462	678	2.784	80,42	466	5	461	98,93
30	Sulawesi Barat	230	10	220	95,65	681	61	620	91,05
31	Maluku	480	7	474	98,65	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6	-	6	100,00	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	141	130	11	7,80
Jumlah		194.456	54.931	139.526	71,75	167.999	28.678	139.321	82,93

Ket : T = Terkena; P = Puso

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 10.

LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN JAGUNG OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	1.513	604	909	60,10	2	2	-	-
2	Sumatera Utara	43	1	42	97,54	11.414	-	11.414	100,00
3	Sumatera Barat	1.308	336	972	74,29	9	-	9	100,00
4	Riau	164	128	36	21,71	3	-	3	100,00
5	Jambi	-	-	-	-	11	3	8	70,59
6	Sumatera Selatan	123	-	123	100,00	607	8	599	98,68
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	1.759	804	955	54,29
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	17	-	17	100,00	51	10	41	80,39
13	Jawa Tengah	758	324	435	57,31	1.363	510	853	62,59
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	1.170	140	1.030	88,04
15	Jawa Timur	63	25	38	59,81	6.931	168	6.763	97,58
16	Banten	-	-	-	-	5	-	5	100,00
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	13	1	12	92,31	8.738	3.965	4.773	54,62
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	4.158	2.150	2.009	48,31
20	Kalimantan Barat	8	-	8	100,00	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	0	-	0	100,00
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	52	2	51	97,12	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	315	214	101	32,04	106	17	89	83,96
27	Sulawesi Selatan	7.477	2.148	5.329	71,27	896	24	872	97,32
28	Sulawesi Tenggara	134	39	95	70,90	25	-	25	100,00
29	Gorontalo	104	36	68	65,71	1	-	1	100,00
30	Sulawesi Barat	4	1	3	75,00	98	4	94	95,90
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		12.096	3.858	8.238	68,10	37.346	7.804	29.542	79,10

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 11.

LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN KEDELAI OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	4	-	4	100,00	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	0	-	0	100,00	-	-	-	-
4	Riau	1	1	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	50	40	10	20,00
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	5	-	5	100,00
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	42	-	42	100,00
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	17	-	17	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	45	45	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	100	80	20	20,00	31	-	31	100,00
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	4	1	3	75,00	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	1	-	1	100,00
Jumlah		154	127	27	17,67	146	40	106	72,51

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 12.

LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN KACANG TANAH OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	0	0	0	50,00	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	5	2	3	63,92	-	-	-	-
4	Riau	3	-	3	100,00	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	5	2	3	60,00
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	22	-	22	100,00
15	Jawa Timur	-	-	-	-	402	-	402	100,00
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	2	-	2	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	430	-	430	100,00
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	2	2	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		8	2	6	76,13	863	4	859	99,54

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 13.

LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN KACANG HIJAU OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

Ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	28	-	28	100,00	25	-	25	100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	38	18	19	51,17	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	75	-	75	100,00
20	Kalimantan Barat	2	2	1	25,00	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		68	20	48	70,58	100	-	100	100,00

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 14.

LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN UBI KAYU OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

Ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	4	2	2	53,65	-	-	-	-
4	Riau	12	9	3	26,23	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	1	0	0	50,00
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	0	-	0	100,00	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	13	-	13	100,00
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		17	11	6	34,31	14	0	13	97,10

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 15.

LUAS BANJIR DAN KEKERINGAN PADA TANAMAN UBI JALAR OKTOBER 2023 – SEPTEMBER 2024

Ha

No	Provinsi	Banjir				KEKERINGAN			
		Luas		Areal Terselamatkan		Luas		Areal Terselamatkan	
		Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)	Terkena	Puso	Luasan (Ha)	Persentase (%)
1	Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	3	1	2	54,55	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	1	2	54,55	-	-	-	-

Data periode laporan 10 Januari 2025



Lampiran 16.

REALISASI PPHT PADI TAHUN 2024

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Jawa Tengah	25	25.000.000	25	100	25.000.000	100
2	Jawa Barat	25	25.000.000	25	100	25.000.000	100
3	Sumatera Selatan	25	25.000.000	25	100	25.000.000	100
4	DI Yogyakarta	25	25.000.000	25	100	25.000.000	100
5	Jawa Timur	25	25.000.000	25	100	25.000.000	100
6	Pendampingan	-	130.000.000	-	-	129.475.000	100
Jumlah		125	255.000.000	125	100,00	254.475.000	99,79

Update data 10 Januari 2025



Lampiran 17.

GERAKAN PENGENDALIAN OPT AKABI TAHUN 2024

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Sumatera Utara	250	100.000.000	250	100	100.000.000	100
2	Riau	100	40.000.000	100	100	40.000.000	100
3	Sumatera Selatan	100	40.000.000	100	100	40.000.000	100
4	Lampung	200	80.000.000	200	100	80.000.000	100
5	Jawa Barat	303	121.200.000	303	100	121.200.000	100,00
6	Jawa Tengah	717	286.800.000	717	100	286.800.000	100
7	DI Yogyakarta	150	60.000.000	150	100	60.000.000	100
8	Jawa Timur	500	200.000.000	500	100	200.000.000	100,00
9	Banten	110	44.000.000	110	100	44.000.000	100
10	Nusa Tenggara Barat	100	40.000.000	100	100	40.000.000	100
11	Nusa Tenggara Timur	50	20.000.000	50	100	20.000.000	100
12	Kalimantan Barat	100	40.000.000	100	100	40.000.000	100
13	Kalimantan Selatan	50	20.000.000	50	100	20.000.000	100
14	Sulawesi Selatan	200	80.000.000	200	100	80.000.000	100
16	Sulawesi Barat	70	28.000.000	70	100	28.000.000	100,00
17	Pusat	-	600.000.000	-	-	599.970.739	100,00
Jumlah		3.000	1.800.000.000	3.000	100	1.799.970.739	100,00

Update data 10 Januari 2025



Lampiran 18.

GERAKAN PENGENDALIAN OPT SEREALIA TAHUN 2024

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	200	80.000.000	200	100	80.000.000	100,00
2	Sumatera Utara	1.550	620.000.000	1.550	100	620.000.000	100,00
3	Sumatera Barat	200	80.000.000	200	100	80.000.000	100,00
4	Riau	250	100.000.000	250	100	100.000.000	100,00
5	Jambi	175	70.000.000	175	100	70.000.000	100,00
6	Sumatera Selatan	2.150	860.000.000	2.150	100	860.000.000	100,00
7	Bengkulu	139	55.600.000	139	100	55.600.000	100,00
8	Lampung	1.450	580.000.000	1.450	100	580.000.000	100,00
9	Kep. Bangka Belitung	50	20.000.000	50	100	20.000.000	100,00
10	Jawa Barat	4.270	1.708.000.000	4.270	100	1.708.000.000	100,00
11	Jawa Tengah	4.363	1.745.200.000	4.363	100	1.745.200.000	100,00
12	DI Yogyakarta	600	240.000.000	600	100	240.000.000	100,00
13	Jawa Timur	4.008	1.603.200.000	4.008	100	1.603.200.000	100,00
14	Banten	945	378.000.000	945	100	378.000.000	100,00
15	Bali	100	40.000.000	100	100	40.000.000	100,00
16	Nusa Tenggara Barat	375	150.000.000	375	100	150.000.000	100,00
17	Nusa Tenggara Timur	200	80.000.000	200	100	80.000.000	100,00
18	Kalimantan Barat	400	160.000.000	400	100	160.000.000	100,00
19	Kalimantan Tengah	200	80.000.000	200	100	80.000.000	100,00
20	Kalimantan Selatan	400	160.000.000	400	100	160.000.000	100,00
21	Kalimantan Timur	150	60.000.000	150	100	60.000.000	100,00
22	Sulawesi Utara	100	40.000.000	100	100	40.000.000	100,00
23	Sulawesi Tengah	600	240.000.000	600	100	240.000.000	100,00
24	Sulawesi Selatan	1.300	520.000.000	1.300	100	520.000.000	100,00
25	Sulawesi Tenggara	275	110.000.000	275	100	110.000.000	100,00
26	Gorontalo	200	80.000.000	200	100	80.000.000	100,00
27	Sulawesi Barat	150	60.000.000	150	100	60.000.000	100,00
28	Maluku	50	20.000.000	50	100	20.000.000	100,00
29	Maluku Utara	50	20.000.000	50	100	20.000.000	100,00
30	Papua Barat	50	20.000.000	50	100	20.000.000	100,00
31	Papua	25	10.000.000	25	100	10.000.000	100,00
32	Papua Selatan	25	10.000.000	25	100	10.000.000	100,00
Jumlah		25.000	10.000.000.000	25.000	100,00	10.000.000.000	100,00

Update data 10 Januari 2025



Lampiran 19.

**KEGIATAN GERAKAN PENANGANAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
TAHUN 2024**

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	800	320.000.000	800	100	320.000.000	100,00
2	Sumatera Utara	600	240.000.000	600	100	240.000.000	100
3	Sumatera Barat	100	40.000.000	100	100	40.000.000	100
4	Riau	255	102.000.000	255	100	102.000.000	100
5	Jambi	250	100.000.000	250	100	100.000.000	100
6	Sumatera Selatan	450	180.000.000	450	100	180.000.000	100
7	Bengkulu	250	100.000.000	250	100	100.000.000	100
8	Lampung	570	228.000.000	570	100	228.000.000	100
9	Jawa Barat	2.110	844.000.000	2.110	100	844.000.000	100,00
10	Jawa Tengah	2.040	816.000.000	2.040	100	816.000.000	100,00
11	DI Yogyakarta	100	40.000.000	100	100	40.000.000	100
12	Jawa Timur	1.270	508.000.000	1.270	100	508.000.000	100,00
13	Banten	671	268.400.000	671	100	268.400.000	100
14	Nusa Tenggara Barat	290	116.000.000	290	100	116.000.000	100
15	Nusa Tenggara Timur	45	18.000.000	45	100	18.000.000	100
16	Kalimantan Barat	320	128.000.000	320	100	128.000.000	100
17	Kalimantan Tengah	250	100.000.000	250	100	100.000.000	100
18	Kalimantan Selatan	825	330.000.000	825	100	330.000.000	100,00
19	Kalimantan Timur	95	38.000.000	95	100	38.000.000	100
20	Sulawesi Utara	90	36.000.000	90	100	36.000.000	100,00
21	Sulawesi Tengah	325	130.000.000	325	100	130.000.000	100
22	Sulawesi Selatan	1.800	720.000.000	1.800	100	720.000.000	100,00
23	Sulawesi Tenggara	200	80.000.000	200	100	80.000.000	100
24	Gorontalo	50	20.000.000	50	100	20.000.000	100
25	Sulawesi Barat	60	24.000.000	60	100	24.000.000	100
Jumlah		13.875	6.650.000.000	13.816	100	6.633.632.847	99,75

Update data 10 Januari 2025



Lampiran 20.

KEGIATAN PEMBUATAN SUMUR TAHUN 2024

No.	Provinsi	Target		Realisasi			
		Volume	Anggaran (Rp)	Volume	%	Anggaran (Rp)	%
1	Aceh	250	375.000.000	250	100	375.000.000	100
2	Sumatera Utara	600	900.000.000	600	100	900.000.000	100
3	Sumatera Selatan	100	150.000.000	100	100	150.000.000	100
4	Jambi	75	112.500.000	75	100	112.500.000	-
5	Bengkulu	1.225	1.837.500.000	1.225	100	1.837.500.000	100
6	Lampung	750	1.125.000.000	750	100	1.125.000.000	100
7	Jawa Barat	1.600	2.400.000.000	1.600	100,00	2.400.000.000	100,00
8	Jawa Tengah	700	1.050.000.000	700	100	1.050.000.000	100
9	DI Yogyakarta	175	262.500.000	175	100	262.500.000	100
10	Jawa Timur	3.775	5.662.500.000	3.775	100,00	5.662.500.000	100,00
11	Banten	300	450.000.000	300	100,00	450.000.000	-
12	Nusa Tenggara Barat	375	562.500.000	375	100	562.500.000	100
13	Kalimantan Barat	300	450.000.000	300	100,00	450.000.000	100,00
14	Kalimantan Selatan	400	600.000.000	400	100,00	600.000.000	-
15	Sulawesi Tengah	100	150.000.000	100	100	150.000.000	100
16	Sulawesi Selatan	2.875	4.312.500.000	2.875	100,00	4.312.500.000	100,00
17	Sulawesi Tenggara	300	450.000.000	300	100	450.000.000	100
Jumlah		13.900	20.850.000.000	13.900	100,00	20.850.000.000	100,00

Update data 10 Januari 2025

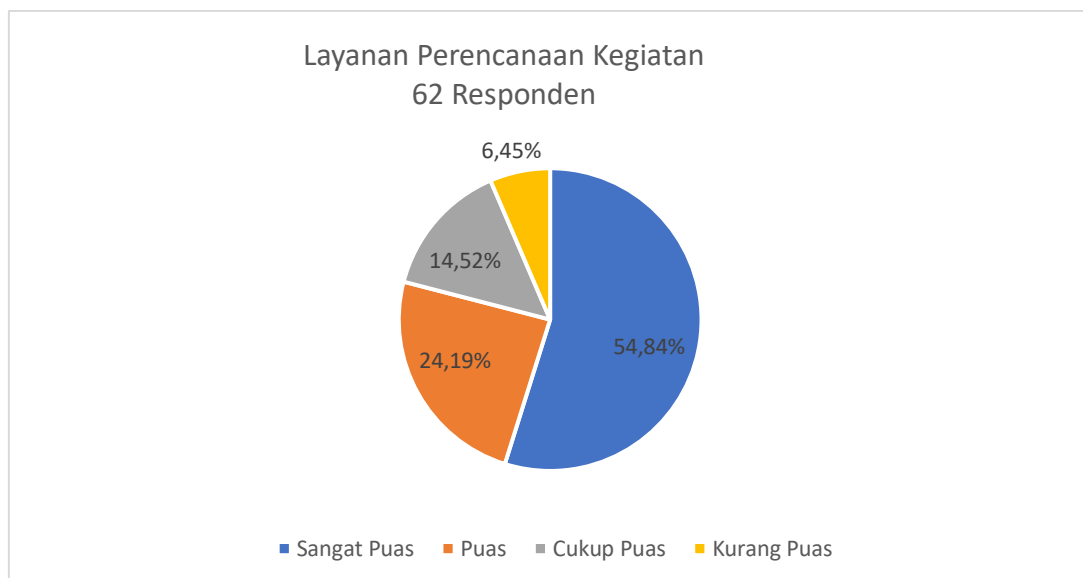


Lampiran 21.

HASIL SURVEI PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN LAYANAN KETATAUSAHAAN DAN RUMAH TANGGA DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN TAHUN 2024

1. Layanan Perencanaan Kegiatan

Jumlah Responden 62 Orang							
Sangat Puas	Persen (%)	Puas	Persen (%)	Cukup Puas	Persen (%)	Kurang Puas	Persen (%)
34	54,84%	15	24,19%	9	14,52%	4	6,45%

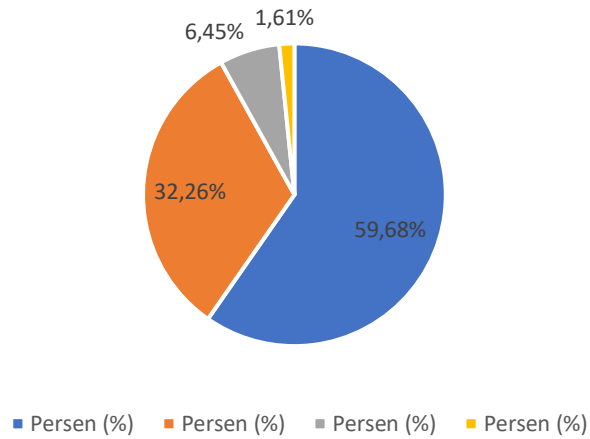


2. Layanan Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Responden 62 Orang							
Sangat Puas	Persen (%)	Puas	Persen (%)	Cukup Puas	Persen (%)	Kurang Puas	Persen (%)
37	59,68%	20	32,26%	4	6,45%	1	1,61%



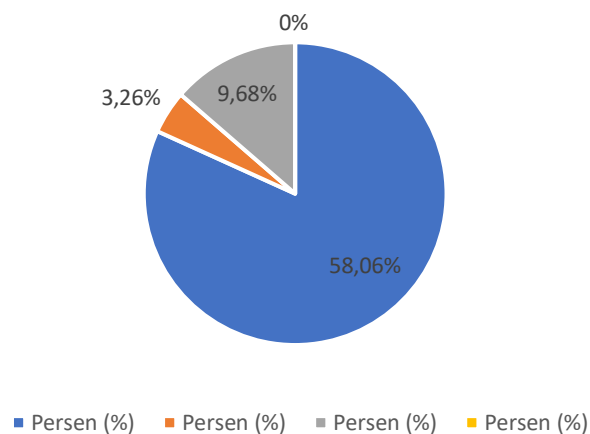
Layanan Evaluasi dan Pelaporan
62 Responden



3. Layanan Kepegawaian

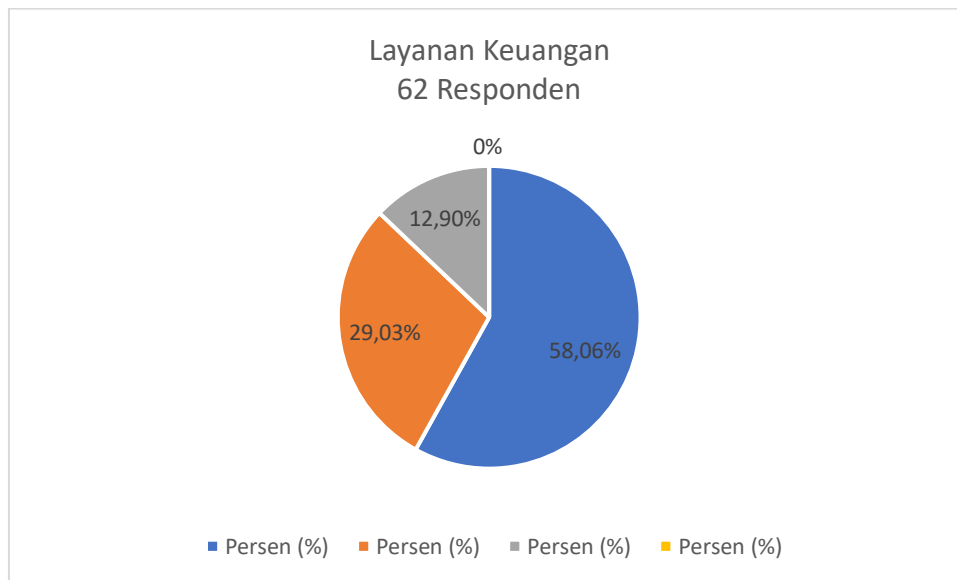
Jumlah Responden 62 Orang							
Sangat Puas	Persen (%)	Puas	Persen (%)	Cukup Puas	Persen (%)	Kurang Puas	Persen (%)
36	58,06%	20	32,26%	6	9,68%	0	0%

Layanan Kepegawaian
62 Responden



4. Layanan Keuangan

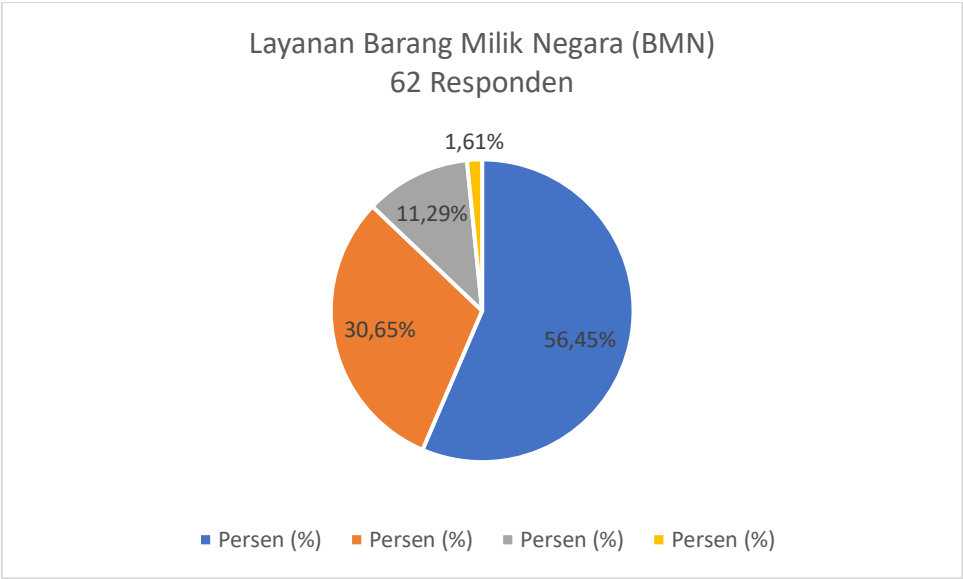
Jumlah Responden 62 Orang							
Sangat Puas	Persen (%)	Puas	Persen (%)	Cukup Puas	Persen (%)	Kurang Puas	Persen (%)
36	58,06%	18	29,03%	8	12,90%	0	0%



5. Layanan Barang Milik Negara (BMN)

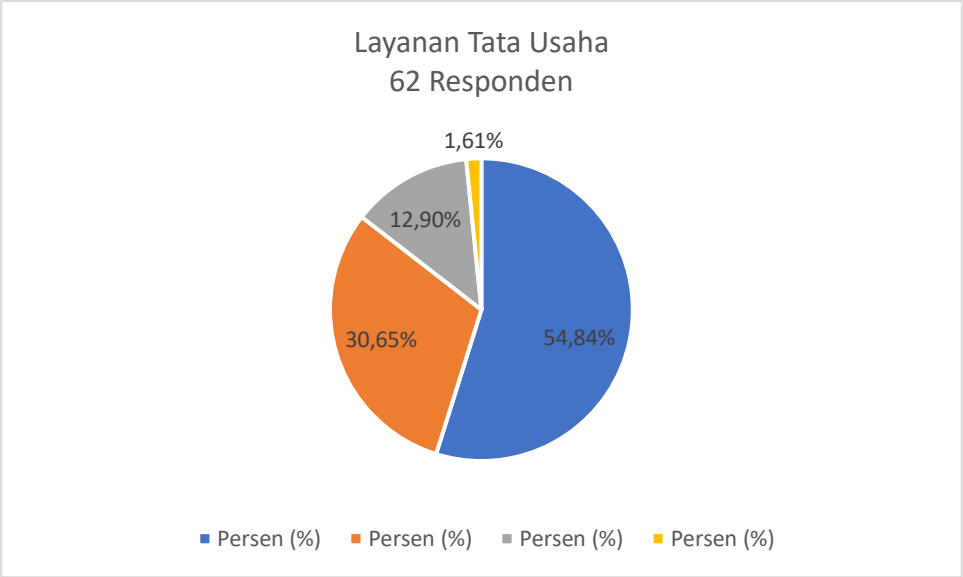
Jumlah Responden 62 Orang							
Sangat Puas	Persen (%)	Puas	Persen (%)	Cukup Puas	Persen (%)	Kurang Puas	Persen (%)
35	56,45%	19	30,65%	7	11,29%	1	1,61%





6. Layanan Tata Usaha

Jumlah Responden 62 Orang							
Sangat Puas	Persen (%)	Puas	Persen (%)	Cukup Puas	Persen (%)	Kurang Puas	Persen (%)
34	54,84%	19	30,65%	8	12,90%	1	1,61%



Lampiran 22.

ANALISIS SKALA LIKERT HASIL SURVEI TINGKAT KEPUASAN LAYANAN INTERNAL

Hasil survey dihitung menggunakan analisis interval dengan menghitung secara kuantitatif jawaban-jawaban dari responden tersebut dan diberi bobot nilai atau skor likert seperti dibawah ini:

1. Sangat Puas = 4
2. Puas = 3
3. Cukup Puas = 2
4. Kurang Puas = 1

Dari tabel di atas dapat dihitung masing-masing jumlah jawaban sebagai berikut:

No	Jawaban	Nilai	Jumlah Responden Setiap Kriteria	Jumlah Nilai
1	Sangat Puas	4	835	3.340
2	Puas	3	451	1.353
3	Tidak Puas	2	172	344
4	Sangat Tidak Puas	1	30	30
	Total Nilai			5.067

- Total Nilai dibagi jumlah responden yaitu 62 orang: $5067 / 62 = 81,72$
- Hasil rata – rata nilai seluruh responden dibagi jumlah pertanyaan survey:
 $81,72 / 24 = 3,405$
- Hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2024 dengan analisis skala Likert adalah **3,405**.
- Klasifikasi Kualitas tingkat kepuasan layanan internal subbagian tata usaha masuk kategori **Sangat Baik**
- Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa target nilai tingkat kepuasan layanan ketatausahaan dan rumah tangga tercapai/sesuai ekspektasi



Lampiran 23.

PERJANJIAN KERJA KEPALA BPMPT TAHUN 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN**

Jl. AUP NO 3 PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12520
KOTAK POS 7264 & 7301/JKS.PM
TELEPON : (021) 7806819 FAKSIMILI : (021) 7806309
WEBSITE : <http://tanamanpangan.pertanian.go.id/>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penanganan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan	1 Jumlah sertifikat hasil uji mutu produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pupuk dan pestisida sesuai permintaan (LHP/Sertifikat)	2.200
2.	Meningkatnya kualitas layanan dan manajemen unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	2 Tingkat kepuasan pegawai Ditjen Tanaman Pangan dan stakeholders terkait layanan ketatausahaan dan rumah tangga BPMPT (Skala likert)	3,4
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPMPT (Indeks)	3,4

Kegiatan
Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan

Anggaran (000)
Rp. 2.202.269.

Direktur Jenderal,

Yudi Sastro
NIP 197207021998031002

Jakarta, September 2024
Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman,

Nila Sovy
NIP 196906072002122001



Lampiran 24.

HASIL PERHITUNGAN SEMBILAN NILAI UNSUR PELAYANAN DALAM KUESIONER SKM BPMPT TAHUN 2024

No	Unsur Pelayanan	Jan – Juni 2024	Juli – Des 2024	Jan – Des 2024
U1	Persyaratan	3,52	3,48	3,50
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,54	3,46	3,50
U3	Waktu Penyelesaian	3,46	3,54	3,50
U4	Biaya / Tarif	2,92	3,56	3,26
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,36	3,57	3,47
U6	Kompetensi Pelaksana	3,48	3,65	3,57
U7	Perilaku Pelaksana	3,68	3,63	3,65
U8	Sarana dan Prasarana	3,54	3,67	3,61
U9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,96	3,59	3,77
Nilai SKM		3,496	3,568	3,533
Nilai Konversi SKM		87,39	89,21	88,32
Nilai Mutu Pelayanan		B	A	A
Kinerja		Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00

B (Baik) : 76,61 - 88,30

C (Kurang Baik): 65,00 - 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat selama tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman secara umum mengalami peningkatan, dengan kinerja Sangat Baik
- Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan (U9) mendapatkan nilai tertinggi 3,77 diikuti dengan Perilaku Pelaksana (U7) mendapat nilai 3,65. Keduanya mendapatkan nilai tinggi karena petugas dirasakan lebih responsif, sopan dan ramah oleh pelanggan



dalam melayani, menangani pengaduan atau permintaan informasi, baik secara online maupun secara langsung.

- Biaya/ Tarif (U4) mendapatkan nilai terkecil 3,26
- Pertanyaan biaya/ tarif periode Januari – Juni 2024 masih menggunakan pertanyaan kuisisioner lama, yaitu: Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?
 - a. Sangat mahal, nilai 1 b. Cukup mahal, nilai 2
 - c. Murah, nilai 3 d. Gratis, nilai 4Dari 50 pelanggan yang mengisi ada 7 menjawab tarif cukup mahal (b, nilai 2) dan BPMPT tidak pernah memberikan pengujian gratis, sehingga hal ini membuat nilai kumulatifnya tergolong kecil (2,92).
- Periode penilaian SKM Juli – Desember 2024 sudah menggunakan pertanyaan baru terkait kesesuaian tarif biaya pelayanan yang dibayarkan dengan PP tarif yang berlaku dan responden mengisi kuisisioner dengan menjawab sesuai dan sangat sesuai (nilai 3,56) tidak ada yang menjawab tidak sesuai.



Lampiran 25.

Hasil Reviu Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2024

CATATAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TA 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL	Disusun oleh/tanggal	Dwi Indra Utami, S.Ikom 11 Februari 2025	
	Diteliti oleh/tanggal	Muhammad Ramdhan, SP A	
	Disetujui oleh/tanggal	Rifki Ariefianto, SE, MM 11 Februari 2025	
	Disetujui oleh/tanggal	Ir. Riade Prihantini, MM 11 Februari 2025	

URAIAN HASIL REVIU

Sehubungan dengan Surat Tugas Inspektur II Nomor: B.0039/PW.160/G.3/02/2025 tanggal 07 Februari 2025, kami telah melaksanakan Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan TA 2024 dengan hasil sebagai berikut:

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST
I	Format	- Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah (IP) - LKj telah menyajikan informasi target kinerja - LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai - Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan - Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan - Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√ √ √ √ √ √
	Kesimpulan: - Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan telah menyajikan data penting organisasi, meliputi penjelasan organisasi (unit kerja), tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia (SDM) secara memadai. - Informasi target kinerja telah disajikan dalam BAB II Perencanaan Kinerja, yaitu: - Pada Program terdapat 8 kegiatan utama penerapan strategi penguatan perlindungan tanaman pangan yang tidak sesuai dengan Renstra (halaman 9) dikarenakan adanya refocusing anggaran Tahun 2024. Telah ditindaklanjuti pada saat reviu - Penjelasan mengenai Pengukuran Indikator Kinerja (SBIK), belum memadai (halaman 15 sd 16): - Pada Indikator Kinerja 1 dan Indikator Kinerja 2 tidak dipisahkan - Belum menyajikan rumus penghitungan interval Indeks Kepuasan Masyarakat Telah ditindaklanjuti pada saat reviu - LKj telah menyajikan capaian kinerja IP, namun belum memadai, yaitu: - Belum ada cara penghitungan realisasi dan capaian kinerja pada IKS 1 dan 2 (halaman 15); Perhitungan rasio serangan OPT telah disajikan di LKj, namun perhitungan realisasi dan capaian kinerja belum disajikan.		

1



Telah ditindaklanjuti pada saat revidi			
b. LKj telah membahas Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; serta Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.			
4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada batang tubuh laporan secara lengkap.			
5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.			
6. LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan.			
NO	PERNYATAAN		CHECKLIST
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√
Kesimpulan:			
1) Laporan kinerja (LKj) disusun tim yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 34/HK.310/C/3/2024 tentang Tim Penilai Mandiri Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2024, yang anggotanya mewakili dari masing-masing unit kerja eselon II.			
2) Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah didukung data yang memadai dan didukung dengan dokumen sumber yang dapat diyakini keandalannya.			
3) Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj di sampaikan oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan ke unit penyusun LKj, dan juknis pengamatan OPT sebagai dasar pengumpulan data kinerja.			
4) Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah didukung data yang cukup memadai dan didukung dengan dokumen sumber yang dapat diyakini keandalannya.			
NO	PERNYATAAN		CHECKLIST
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√



	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
	10. IKU dan IK telah SMART	√
Kesimpulan: 1. Sasaran pada LKj, yaitu pada Direktorat Perlindungan terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja dan BPMPT terdapat 2 (dua) sasaran Kegiatan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja telah sesuai/sama dengan Perjanjian Kinerja (PK). 2. Sasaran, indikator kinerja dan target pada LKj telah selaras dengan Renstra Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2020 – 2024. 3. Indikator Kinerja yang ditetapkan telah cukup untuk mengukur target sasaran dan masuk kategori SMART.		

Plh. Ketua Kelompok Substansi Data dan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan



Gandi Purnama, S.PM, Si
NIP. 19790219 2009121001

Jakarta, 11 Februari 2025

Pengendali Teknis



Rifki Ariefianto, SE, MM
Ketua Tim



Muhammad Ramdhan, S.P
Anggota Tim



Sutresno, S.TP, M.Si



Dwi Indra Utami, S.IKom





**DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**